

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN
DAN KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

Nama : HARNINA
NPM : 1305180045
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

HARNINA. 1305180045. Analisis Ketimpangan Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Sumatera Utara

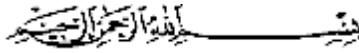
Provinsi SUMUT dalam bidang pendidikan dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang rusak berat sampai rusak ringan sekitar 8938 sedangkan ruang kelas yang baik 2310 kelas. Dari jumlah tersebut ruang kelas yang baik hanya sekitar 26%. Dari segi angka integritas Sumatera Utara nilai berkisar 50,22 sedangkan angka integritas nasional 62,28 di bidang Uji Kompetensi Guru (UKG). Pada 2015, SUMUT menduduki 52,43 secara nasional 56,59. Sementara akreditasi SD yang akreditasi A hanya 5,2% sedangkan SMP 15,1% SMA,31,2% sedangkan SMK 13,4%. Inilah potret pendidikan di SUMUT dilihat dari angka-angka sesuai dengan neraca pendidikan daerah yang diduga mengalami ketimpangan pada sektor pendidikannya.

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis data deskriptif yaitu menjabarkan semua data keterangan yang diperoleh baik dalam bentuk persentase, rata-rata, grafik dan lain-lain dan menggunakan Indeks Williamson serta Tipology Klasen. Adapun objek penelitian ini adalah data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tentang Sarana Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan siswa yang dilihat dari pertumbuhan jumlah siswa di Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 3.065.280 jiwa pada tahun 2015, adapun jumlah siswa selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan jumlah siswa tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 509.777 jiwa. Berdasarkan Indeks Williamson yang diperoleh dari mengukur tingkat ketimpangan antara jumlah siswa kabupaten kota di Sumatera Utara dengan jumlah sarana pendidikan, maka diperoleh hasil beberapa kabupaten kota dengan ketimpangan tertinggi pada tahun tertentu, yaitu Kota Medan pada tahun 2013 dengan nilai IW 0.39. Kota Medan 0,49 pada tahun 2013 dan tingkat ketimpangan antara jumlah siswa di kabupaten kota di Sumatera Utara dengan tenaga pendidik yang tersedia adalah Kota Medan sebagai Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat ketimpangan tertinggi sepanjang tahun 2011-2015, yaitu 0,3437 pada tahun 2011, 0,3256 pada 2012, 0,4689 pada 2013, 0,3462 pada 2014 dan 0,3445 pada 2015. Menurut Pemetaan dengan Typologi Klassen antara jumlah siswa dengan sarana pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah di Provinsi Sumatera Utara yang masuk ke dalam kuadran I, dan antara pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran pendidikan didapatkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal sebagai daerah di Provinsi Sumatera Utara yang masuk ke dalam kuadran I.

Kata Kunci: Analisis, Ketimpangan, Pendidikan, Provinsi Sumatera Utara

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul **“Analisis Ketimpangan Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Sumatera Utara”**. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, agar kita menjadi orang-orang intelektual.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun atas ridho Allah, berkat usaha, doa, motivasi dari orangtua dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memotivasi, membimbing, mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tulus serta materi yang selama ini kalian berikan kepada Ananda, sehingga Ananda bisa menjadi seperti sekarang.
2. Bapak DR. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan tinggi di UMSU.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri S.E., M.M., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Hj. Lailan Safina Hsb., M.Si. dan beserta Ibu Dr. Prawidia Hariani, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidia Hariani, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Proposal sampai selesainya Skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran pada penulis.
7. Buat seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jika ada tulisan dalam skripsi ini yang kurang jelas atau salah ketik, penulis mohon maaf lahir dan batin, karena setiap insan pasti ada salah dan khilaf. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis. Amiin.

Medan, 19 April 2017

Penulis

HARNINA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	14
1. Batasan Masalah	14
2. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Teoritis.....	17
1. Pendidikan.....	17
a. Pengertian Pendidikan.....	17
b. Tujuan Pendidikan	19
c. Lembaga Pendidikan.....	20
d. Pengertian Anak Putus Sekolah.....	21
e. Faktor -Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah.....	22
2. Defenisi Ketimpangan	23
a. Jenis jenis Ketimpangan.....	23
b. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan.....	27
c. Penyebab Ketimpangan Ekonomi.....	29
3. Defenisi Pembangunan Ekonomi	31
a. Pengertian pembangunan ekonomi menurut para ahli....	32
b. Tujuan Pembangunan.....	33
c. Faktor faktor Pembangunan Ekonomi	34
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual	36
D. Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Defenisi Operasional	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknis Analisis Data.....	39
1. Analisis <i>Indeks Wiliamson</i>	39
2. Analisis Tipologi Klasen.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	44
1. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara	44
a. Letak Provinsi Sumatera Utara.....	44
b. Kondisi Iklim Provinsi Sumatera Utara	45
2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	47
a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara	47
b. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara.....	48
c. Inflasi Provinsi Sumatera Utara.....	49
d. Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara	50
3. Kondisi Sosial Provinsi Sumatera Utara.....	51
a. Jumlah Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara	51
b. Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara.....	52
c. Tingkat Kemiskinan (<i>Poverty</i>) di Provinsi Sumatera Utara.....	54
d. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (<i>Poverty</i>) di Provinsi Sumatera Utara	55
e. Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara.....	56
f. Pertumbuhan Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara	57
g. Kondisi Human Develompent Indeks (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Sumatera Utara	59
1) Indeks Angka Harapan Hidup.....	60
2) PDRB Perkapita	61
4. Kondidi Sarana Fisik dan Tenaga Pendidik pada Sektor Pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara.....	63
a. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara.....	63
b. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru SD, SMP, SMA dan SMK) di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara.....	68
B. Hasil Penghitungan Indeks Williamson.....	44
1. Sarana Fisik Pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara	74
2. Tenaga Pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara.....	76

C. Analisis Tipologi Klassen.....	78
1. Analisis Tipologi Klassen Jumlah Siswa dan Jumlah Sarana Fisik Pendidikan	79
2. Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kota Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	38
Tabel 3.2 Tipologi daerah Berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Pendapatan.....	41
Tabel 3.3 Tipologi daerah Berdasarkan Ketimpangan Pendidikan dan jumlah Siswa	43
Tabel 4.1 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara ...	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (Jiwa)..	52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	54
Tabel 4.4 Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015..	56
Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	60
Tabel 4.6 Persentase Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	61
Tabel 4.7 PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	62
Tabel 4.8 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara.....	63
Tabel 4.9 Jumlah Guru di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara.....	69
Tabel 4.10 Indeks Williamson Sarana Fisik Pendidikan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	75
Tabel 4.11 Indeks Williamson Tenaga Pendidik dengan Jumlah Siswa di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	77

Tabel 4.12 Tipologi daerah Berdasarkan Laju Pertumbuhan Sarana Pendidikan dan Jumlah Siswa.....	81
Tabel 4.13 Tipologi daerah Berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan.....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Lorenz	24
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).....	48
Gambar 4.2 Pertumbuhan Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 .	49
Gambar 4.3 Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	50
Gambar 4.4 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	53
Gambar 4.5 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	55
Gambar 4.6 Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	58
Gambar 4.7 Pertumbuhan Sarana Fisik Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015	67
Gambar 4.8 Pertumbuhan Tenaga Pendidikan (Guru) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	73
Gambar 4.9 Tipologi Klasen Sarana Fisik Pendidikan dan Jumlah Siswa.....	80
Gambar 4.10 Tipologi Klasen Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan	82

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Sumatera Utara Tahun 2011-2015.....	12
Grafik 1.2 Persentase Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan 2011-2015.....	13
Grafik 2.1 Kurva Lorenz	24
Grafik 2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
Grafik 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan usaha usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktur, sikap, hidup, kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Akibat adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia diberbagai wilayah Indonesia, yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro,2011). Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemberataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu Negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini

dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam Hal kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia,

Istilah pembangunan sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Terminologi yang erat kaitannya dengan pembangunan dikenal konsep delapan jalur pemerataan yang merupakan penjabaran dari terologi pembangunan. Delapan jalur pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan dalam hal: (1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, berupa pangan, sandang, perumahan, (2) kesempatan memperoleh pendidikan. Dan kesehatan, (3) pembagian pendapatan (4) kesempatan kerja (5) kesempatan berusaha (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita (7) penyebaran pembangunan (8) kesempatan dalam memperoleh keadilan. (Dalam GBHN, 1983)

Adapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik pembangunan dimasyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan sebagai berikut: (Todaro, 2011)

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
2. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi, tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari lingkungan sikap penghambaan dan perasaan bergantung kepada orang dan Negara bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report (HDR) 1995* (Dalam Todaro) yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

a. Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*equity*)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalannya baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dan pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa ini karena pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia - manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau

terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di Indonesia pemerintah sudah memberikan anggaran khusus untuk sektor pendidikan, tetapi belum sepenuhnya merata di Indonesia. Karena masih banyak anak di Indonesia yang masih tidak sekolah, dikarenakan kurang biaya. Kurangnya sosialisasi dimasyarakat yang menjadikan orang-orang di pedesaan tidak mengetahui kalau pemerintah sudah memberikan anggaran khusus seperti BOS dan sekarang ini sudah dibebaskan biaya sekolah sampai SMA. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dipertegas lagi oleh undang-undang system pendidikan nasional tahun 2003 pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Pada dunia pendidikan, globalisasi akan mendatangkan kemajuan yang sangat cepat yakni munculnya beragam sumber belajar dan pemanfaatan media massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional

Sekolah (selanjutnya disingkat BOS) namun persebarannya belum merata. Belum lagi BOS yang tidak sampai ketempat karena korupsi. Dekan fakultas muslim Indonesia menyebutkan bahwa dari penggunaan BOS di tiap provinsi terlihat bahwa pemanfaatan untuk gaji guru dan tenaga administrasi honor BOS yang belum tepat. Kebocoran anggaran ataupun dalam bentuk lebih parah seperti korupsi pendidikan, menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunya kualitas layanan pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntunan era globalisasi, padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti kurikulum, dulu cara belajar siswa aktif (CBSA), kemudian *link and match*, kemudian kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan terakhir adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Kurikulum itu terdiri dari alat dasar; dokumen tertulis; pelaksanaan dan hasil belajar yang sering digonta-ganti dan dimodifikasi atau diubah-ubah itu adalah pada dokumen tertulisnya.

Berdasarkan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015, jumlah penduduk Provinsi SUMUT tahun 2015 tercatat sebanyak 13.923.262 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan hasil Sensus Penduduk periode sebelumnya, yaitu sebesar 8.360.894 jiwa pada tahun 1980, kemudian meningkat menjadi sebesar 10.256.027 jiwa pada tahun 1990, sebesar 11.513.973 jiwa tahun 2000, dan akhirnya meningkat menjadi 12.982.204 jiwa pada Sensus Penduduk 2010. Secara

nasional jumlah penduduk SUMUT merupakan yang terbesar keempat setelah Provinsi Jawa Barat (46.668.214 jiwa), Jawa Timur (38.828.061 jiwa), dan Jawa Tengah (33.753.023 jiwa).

Walaupun jumlah penduduk terus bertambah, namun pertambahan tersebut dapat ditekan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2015 yang lebih rendah dari periode-periode sebelumnya. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 diperoleh rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 2010-2015 sebesar 1,41% Menurut hasil Sensus Penduduk 2010 diperoleh rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Sumatera Utara pada periode 2000-2010 sebesar 1,22% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk SUMUT terus mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Provinsi SUMUT dalam bidang pendidikan dapat kita lihat yang terjadi yakni jumlah sekolah yang rusak berat sampai rusak ringan sekitar 8938 sedangkan ruang kelas yang baik 2310 kelas. Dari jumlah tersebut ruang kelas yang baik hanya sekitar 26%. Dari segi angka integritas Sumatera Utara nilai berkisar 50,22 sedangkan angka integritas nasional 62,28 di bidang Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 2015, SUMUT menduduki 52,43 secara nasional 56,59. Sementara akreditasi SD yang akreditasi A hanya 5,2% sedangkan SMP 15,1% SMA,31,2% sedangkan SMK 13,4%. Inilah potret pendidikan di SUMUT di lihat dari angka angka sesuai dengan neraca pendidikan daerah.

Pendidikan juga merupakan salah satu indikator dalam penentuan nilai (*Human Development Indeks*) atau indeks pembangunan manusia. (selanjutnya, disingkat dengan IPM). Berdasarkan laporan IPM tahun 2013 yang dikeluarkan

PBB untuk program pembangunan, UNDP, memperlihatkan bahwa nilai IPM kabupaten provinsi Sumatera Utara diatas rata-rata mengalami peningkatan sebesar 69,51. Hal ini karena IPM merupakan salah satu ukuran pembangunan ekonomi, sebab tingginya nilai IPM dapat menggambarkan kesuksesan suatu Negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau meningkatkan pembangunan ekonomi, sebab IPM meliputi ruang lingkup hidup, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan perkapita, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena indikator tersebut sangat mempengaruhi dengan kualitas sumber daya manusia dan produktifitasnya. Adapun data IPM (indek pembangunan manusia) dan indeks harapan hidup di kabupaten kota sumatera utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-1
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut
Kota Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

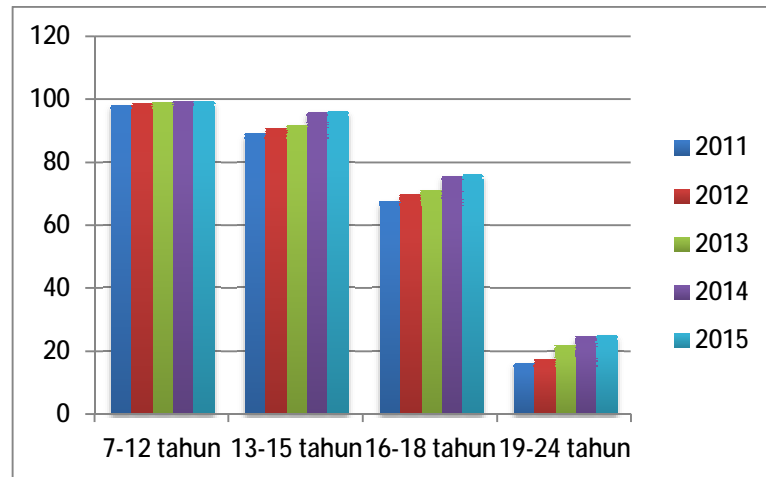
Kabupaten/Kota	Harapan Hidup				IPM
	Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Pengeluaran riil per kapita (Rp.000)	
Kabupaten					
01. Nias	68,97	11,77	4,76	6 234	58,85
02. Mandailing Natal	61,58	12,77	7,63	9 096	63,99
03. Tapanuli Selatan	63,74	13,06	8,27	10 623	67,63
04. Tapanuli Tengah	66,59	12,40	8,02	9 555	67,06
05. Tapanuli Utara	67,55	13,19	9,31	11 079	71,32
06. Toba Samosir	69,14	13,18	10,08	11 535	73,40
07. Labuhanbatu	69,36	12,57	8,75	10 356	70,23
08. Asahan	67,37	12,49	8,32	10 067	68,40
09. Simalungun	70,34	12,69	8,80	10 728	71,24
10. Dairi	67,78	12,80	8,69	9 708	69,00
11. Karo	70,62	12,22	9,50	11 800	72,69
12. Deli Serdang	71,00	12,52	9,48	11 359	72,79
13. Langkat	67,63	12,70	7,92	10 364	68,53
14. Nias Selatan	67,66	11,96	4,64	6 454	58,74
15. Humbang Hasundutan	68,10	13,15	8,90	6 889	66,03
16. Pakpak Bharat	64,85	13,80	8,45	7 496	65,53
17. Samosir	70,26	13,41	8,84	7 698	68,43
18. Serdang Bedagai	67,47	12,31	8,08	10 110	68,01
19. Batu Bara	65,80	11,96	7,74	9 692	66,02
20. Padang Lawas Utara	66,50	11,87	8,91	9 363	67,35
21. Padang Lawas	66,31	12,91	8,40	7 955	65,99
22. Labuhanbatu Selatan	68,09	12,73	8,68	10 319	69,67
23. Labuhanbatu Utara	68,70	12,12	8,31	11 201	69,69
24. Nias Utara	68,59	12,40	6,06	5 627	59,88
25. Nias Barat	67,94	12,33	5,74	5 207	58,25
Kota					
71. Sibolga	67,70	13,10	9,85	10 765	71,64
72. Tanjungbalai	61,90	12,40	9,12	10 326	66,74
73. Pematangsiantar	72,29	13,99	10,73	11 388	76,34

74. Tebing Tinggi	70,14	12,23	10,06	11 393	72,81
75. Medan	72,28	13,97	11,00	14 191	78,87
76. Binjai	71,59	13,56	10,28	10 098	73,81
77. Padangsidempuan	68,32	14,48	10,47	9 668	72,80
78. Gunungsitoli	70,29	13,65	8,18	6 742	66,41
Sumatera Utara	68,29	12,82	9,03	9 563	69,51

Sumber: BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2015

Dari Tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan di kabupaten Sumatra utara tahun 2015. Rata rata provinsi Sumatera Utara indeks pembangunan manusianya atau (IPM) sebesar 69.51 dan diatas rata rata provinsi, medan diatas rata rata provinsi sebesar 78.26 diatas rata rata provinsi dan Binjai sebesar 72,55 dan Deli Serdang sebesar 72,79 dan humbang hasundutan sebesar 66.03 dijelaskan bahwa IPM dikabupaten Sumatra utara mengalami peningkatan yang fluktuatif . dan dibawah rata rata provinsi Sumatera Utara Nias sebesar 58.85 dan Nias Selatan sebesar 58.74 dan Nias barat sebesar 58.25 dibawah rata rata provinsi. Berdasarkan data IPM dapat ditentukan kebutuhan daerah berdasarkan harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, pemerintah dapat melakukan perhitungan dan penetapan anggaran sektor pendidikan dan keseluruhannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah sehingga dapat melaksanakan pendidikannya dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Adapun grafik perkembangan tingkat partisipasi sekolah adalah:

Grafik 1-1
Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Sekolah
Penduduk Sumatera Utara Tahun 2011-2015

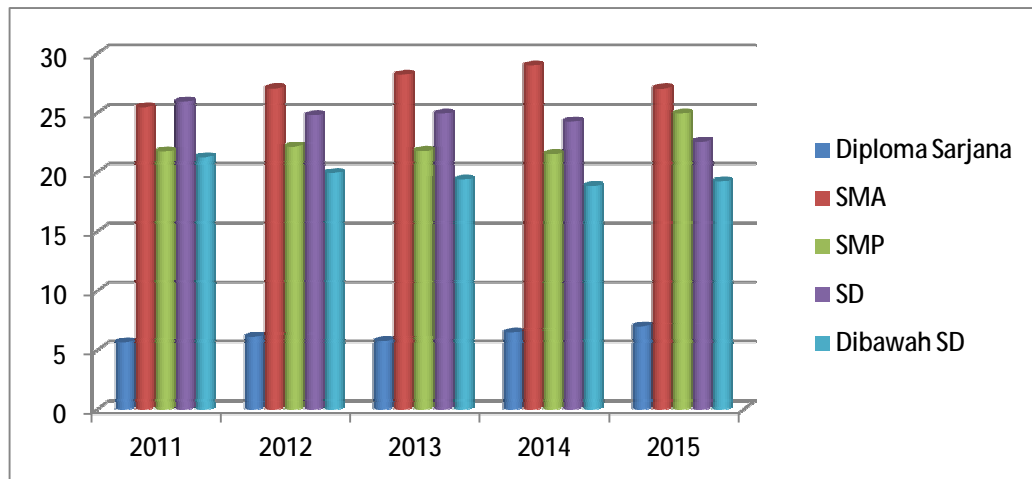


Sumber : BPS SUMUT

Dari grafik diatas menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Sumatera Utara SD pada usia 7-12 tahun SD meningkat dari 98,33 pada tahun 2011 menjadi 99,35% pada tahun 2015, pada kelompok umur 13-15 tahun SMP yang meningkat dari 89,10% menjadi 96,34% pada tahun yang sama. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok umur 16-18 SMA dan 19-24 tahun Sarjana, di mana keduanya menunjukkan peningkatan dari 67,54% pada tahun 2010 menjadi 76,23% pada tahun 2015 dari kelompok umur 19-24 tahun meningkat dari 16,42% menjadi 25,16% pada tahun yang sama.

Berdasarkan grafik diatas ternyata di Sumatera Utara lebih banyak SMP nya hampir sama dengan pendidikan SMA, dan kuliah tidak sampai sebagian SMP dan SMA. Bahwasanya pendidikan kualitas manusia dilihat dari persentase penduduk provinsi berdasarkan pendidikan yang dicapai. Dan untuk melihat persentase penduduk menurut kabupaten kota pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka, untuk lebih lanjut dapat dilihat grafik 1-2 dibawah ini.

Grafik 1-2
Persentase Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi
Ditamatkan 2011-2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, (SUSENAS) diolah (2011-2015)

Grafik diatas adalah grafik pendidikan tertinggi ditamatkan 2011-2015. Dari grafik tersebut perlu diperhatikan adalah kabupaten yang berada di Pulau Nias. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak / belum pernah sekolah di 4 kabupaten tersebut sangat tinggi, yaitu di Nias mencapai 24,08%, Nias Selatan 21,88%, Nias Barat 20,40%, Nias Utara 12,25%. Jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan atas perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan.

Dilihat dari persentase penduduk pendidikan tertinggi yang ditamatkan, banyaknya di Sumatera Utara penduduk menurut pendidikan yang cuman tamat SD banyak penduduknya, sehingga saya mau melihat ketimpangan di Sumatera Utara, saya ingin menganalisis karna berhubungan dengan dana APBN 20% untuk kebijakan provinsi di Sumatera Utara. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ketimpangan pendidikan terhadap pendapatan yang ada diprovinsi Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Ketimpangan**

Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas yang diuraikan di atas bahwa masalah identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Ketidakterdistribusian akses pendidikan pada beberapa wilayah di Indonesia mengakibatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) relatif lebih rendah
2. Ketimpangan Pendidikan yang tinggi akan berdampak pada menurunnya indeks daya saing suatu daerah, seperti Provinsi Sumatera Utara.
3. Alokasi dana untuk sektor pendidikan terus meningkat sesuai dengan UU No 20 tahun 2003, tetapi angka putus sekolah pada level SD dan SMP semakin meningkat.
4. Tingkat harapan hidup Sumatera Utara mengalami kenaikan, termasuk masyarakat Provinsi Sumatera Utara akan tetapi harapan sekolahnya masih relatif rendah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi dengan melakukan analisis ketimpangan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pendapatan kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011-2015.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan beberapa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan pendidikan pada wilayah di kabupaten /kota se Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2015.
- b. Bagaimana ketimpangan pendidikan wilayah kabupaten dan kota se provinsi Sumatera Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk

- a. Melakukan analisis perkembangan pendidikan pada wilayah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2015
- b. Melakukan analisis Indeks williamson pada sektor pendidikan di kabupaten/kota di Sumatera Utara, guna Tipologi Klasen.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademik

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang diambil diantaranya :

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan analisis ketimpangan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pendapatan kabupaten kota provinsi Sumatera Utara.
- b) Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ketimpangan pendidikan berperan banyak dalam memajukan ekonomi rakyat.

- c) Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian khususnya ketimpangan pendidikan.

b. Non Akademik

- a) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi peningkatan ketimpangan pendidikan di provinsi Sumatera Utara.
- b) Bagi perbankan, hasil penelitian ini berguna sebagai masukan dalam mengeluarkan kebijaksanaan analisis ketimpangan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pendapatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut didasari kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah, karena bagaimanapun juga, kebudayaan tidak hanya berpangkal dari naluri semata mata tapi terutama dilahirkan dari proses belajar dalam arti yang sangat luas.

Bratanata dkk, mengartikan pendidikan sebagai usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya (Ahmadi dan Uhbiyati 2007:69). Sedangkan Jhon Dewey mendefenisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan kecakapan fondamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Menurut Brown (dalam ahmadi 2004 :74) bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan perubahan

didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui didalam kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Ahmadi dan Uhbiyati (2007:70) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan dan dicita citakan dan berlangsung terus menerus.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk dapat mengembangkan potensi potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya dimasyarakat.

Masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting dlam kehidupan. Bahkan pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga. Maupun kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dinegara itu. Dalam hal ini masing masing negara menentukan sudi dasar dan tujuan pendidikan di negaranya. Pendidikan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu:

- 1) Pendidikan formal

Menurut undang undang No 20 tahun 2003 pendidikan formal didefenisikan sebagai jalur pendidikan yang struktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2) Pendidikan non formal

Pendidikan non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang (undang undang No 20 tahun 2003)

3) Pendidikan informal

Pendidikan menurut undang undang No 20 tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri,(suprijanto)

b. Tujuan Pendidikan

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan wakt yang cukup lama. Hasil dari suatu pendidikan tidak segera dapat hasilnya atau dirasakan, disamping itu hasil akhir dari pendidikan ditentukan pula oleh hasil dari bagian pendidikan yang sebelumnya. Untuk membawa anak kepada tujuan akhir maka perlu anak diantar terlebih dahulu kepada tujuan bagian bagian pendidikan. Menurut langevel (Ahmadi dan Uhbiyati 2007: 105) tujuan pendidikan bermacam macam yaitu:

- 1) Tujuan umum
- 2) Tujuan khusus
- 3) Tujuan tak lengkap
- 4) Tujuan insidental (tujuan seketika atau sesaat)
- 5) Tujuan sementara

6) Tujuan perantara

Demikian macam macam tujuan pendidikan, yang kesemuanya mengarah ketujuan umumpendidikan. Yaitu menuju kehidupan sebagai insal kamil dimana terjamin adanya hakikat manusiasecara harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia agar supaya memiliki keterampilan dan mampu bersaing dan berdaya guna bagi bangsa dan negara.

c. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah badan usah yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.

1) Lembaga pendidikan formal

Pada umumnya lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk mengubah generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. (Ahmadi dan Uhbiyati 2007:162). Bagi pemerintah karena dalam rangka pengembangan bangsa dibutuhkan pendidikan, maka jalur yang ditempuh untuk mengetahui outputnya secara kuantitatif maupun kualitatip

2) Lembaga pendidikan non formal.

Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib,dan berencana, diluar kegiatan persekolahan. Komponen yang diperlukan dalam lembaga pendidikan non formal

harus disesuaikan dengan keadaan anak/peserta didik agar memperoleh hasil memuaskan.

3) Lembaga pendidikan in formal.

Dalam lembaga pendidikan in formal kegiatan pendidikan tanpa organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu (tak terbatas) dan tanpa adanya evaluasi adapun alasannya diatas pendidikan in formal tetap memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang/ pesera didik.

d. Pengertian Anak Putus Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat dimana seorang anak untuk belajar dan menuntut ilmu. Akan tetapi sekolah tidak dapat memberikan jaminan terhadap anak untuk terus melanjutkan pendidikannya. Hal ini dapat dilihat banyaknya anak yang putus sekolah. Dalam hal ini yang dimaksud putus sekolah ialah suatu keadaan dimana murid murid keluar sekolah sebelum waktunya menamatkan pelajaran yang disebabkan berbagai faktor yang ada diluar dirinya. Dalam hubungan putus sekolah ini djumhur dan surya mengatakan bahwa putus sekolah adalah kegagalan murid dalam menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Menurut Gubali (1982: 76) putus sekolah terjadi karena dua bentuk kemungkinan yaitu:

- 1) Mengundurkan diri sekolah sebelum menamatkan pelajaran dan
- 2) Gagal dalam menempuh ujian akhir.

e. Faktor -Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

1) Faktor lingkungan

a) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan sekelompok manusia yang hanya terdiri dari orang tua (ibu dan ayah) dengan anak anaknya yang belum menikah, menurut bahrudin salam (2002) mengemukakan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama berlangsung secara wajar dan informal serta melalui media permainan.

b) Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa seorang anak, maka disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolahpun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi seorang anak. (Jamaludin 2009:156-157)

c) Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan dimana seseorang hidup bergerak dan melakukan interaksi dengan orang lain dan saling mempengaruhi lingkungan yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang tidak baik pula terhadap seorang anak, apalagi anak berusia sekolah.

2) Faktor ekonomi

Pendidikan di pandang sebagai salah satu faktor pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, karena ekonomi merupakan karena faktor utama menjalankan pendidikan. Ekonomi orang tua yang tidak merata menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua bekerja keras mencukupi kebutuhan sehari hari sehingga perhatian orang tua terhadap pendidikan cenderung terabaikan.

2. Defenisi Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagai masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

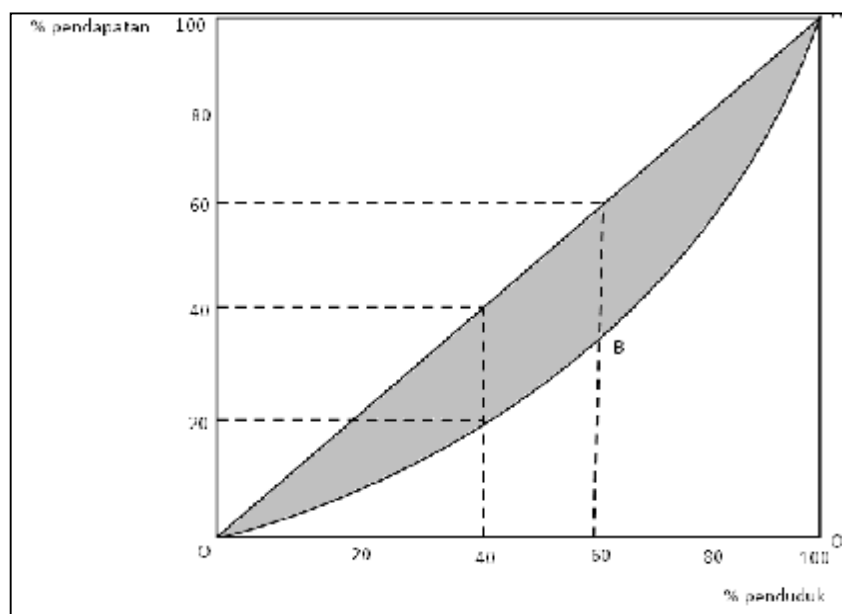
a. Jenis jenis Ketimpangan

1) Distribution income (ketimpangan disrtribusi pendapatan)

Ketimpangan distribusi yang tidak proposional dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam Negara(todaro 2011) terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*distribution income disparities*) diantaranya yaitu :

a) Kurva lorenz (*lorenz curve*)

Kurva lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat, kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan total yang benar benar mereka terima selama priode tertentu misalnya satu tahu



***Sumber: michael P. Todaro dan Stephen C.Smith,
Pembangunan Ekonomi Edisi 11
Gambar 2-1 Kurva Lorenz***

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonalnya berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

b) Gini indeks/gini Ratio

Gini indeks adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan.

Maksimum dan Minimum nilai G adalah $0 \leq G \leq 1$ Untuk menghitung Gini indeks yaitu:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1}) (Q_i + Q_{i-1}) \dots \dots \dots (2-1)$$

Dimana

G = Gini Index

P_i = Persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke-i

Q = Persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke-i

I = 1,2,3,...,n

$G = 0$, perfect Equality

$G = 1$, Perfect Inequality

c) Indeks Wiliamsom

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terdapat distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan dalam wilayah suatu negara.

Jeffery G. Wiliamsom (1995) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Williamson menggunakan Williamson Index (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson mengukur PDRB perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2/n}}{Y}, 0 < IW < 1 \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan

IW = Indeks Wiliamson

Y_i = Pendapatan perkapita daerah i

Y = Pendapatan per kapita rata rata seluruh daerah

F_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka koefisien Indeks Williamson adalah $0 < IW < 1$. jika Indeks Williamson semakin kecil atau semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Walaupun indeks ini memiliki kelemahan yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan wilayah

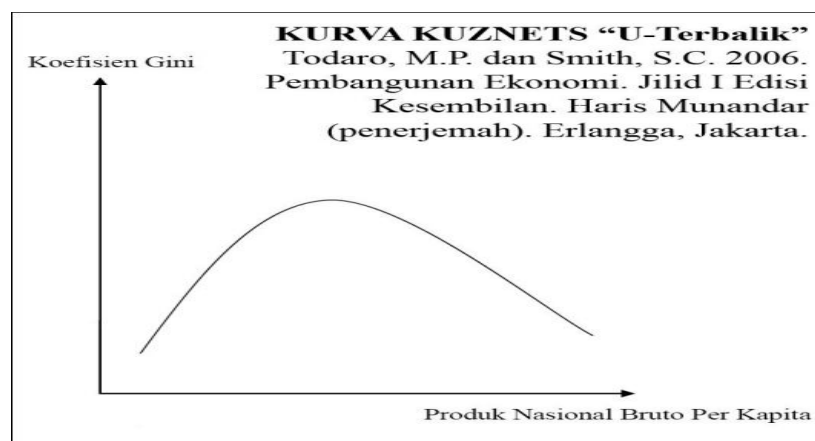
b. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Simon Kuznet (Todaro, 2011) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva kuznet “U- terbalik” (hipotesis kuznet).

Pembuktian hipotesis kuznet dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan (indeks

wiliamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variable tersebut menunjukkan kurva U-terblik, maka hipotesis kuznet terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan pada tahap- tahap berikutnya ketimpangan menurun, pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya.

Kurva kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sector modern, seiring dengan perkembangan sebuah Negara dari perekonomian modern. Disamping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi disektor pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu, karena sector modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Jadi, walaupun kuznet tidak menyebutkan mekanisme yang dapat menghasilkan kurva U- terbalik ini, secara prinsip hipotesis tersebut konsisten dengan proses bertahap dalam pembangunan ekonomi. Namun terlihat bahwa, dampak pegayaan sector tradisional dan modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung berlawanan arah.



c. Penyebab Ketimpangan Ekonomi

1) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan dimasing masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, akan tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Demikian pula halnya dengan rtingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

2) Perbedaan kondisi demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi

demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerjadamn pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

3) Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah

Perbedaan konsentasi ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah konsentarsi kegiatan ekonomi yang lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat, demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relative rendah yang selanjutnya mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapat lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

3. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat,2013) pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income perkapita*) dalam

jangka panjang (Subandi,2011:9). Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama waktu kurun panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang(mejer dikutip dalam kuncoro, 2006).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan. Salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Dan tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dibidan pertanian.

a. Pengertian pembangunan ekonomi menurut para ahli :

1) Menurut Adam Smith

Pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam

2) Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5)

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan

nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

b. Tujuan Pembangunan

Adapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan disemua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang

bersifat materi. Tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.

- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari lingkungan sikap penghamba dan prasaan bergantung kepada orang dan negara bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

c. Faktor faktor Pembangunan Ekonomi

Sumber daya alam yang dimiliki mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua , yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada dimasyarakat, kedaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel digunakan dan Data	Metode Estimasi	Hasil Penelitian
Herwin Mopangga, 2011	Analisis Ketimpangan Pembangunan	Log $Iw=log$ $\varphi +$	$Iw:Indeks$ $Williamson$ $GR: Indeks$	Regresi Linier Berganda	Tingkat Ketimpangan yang

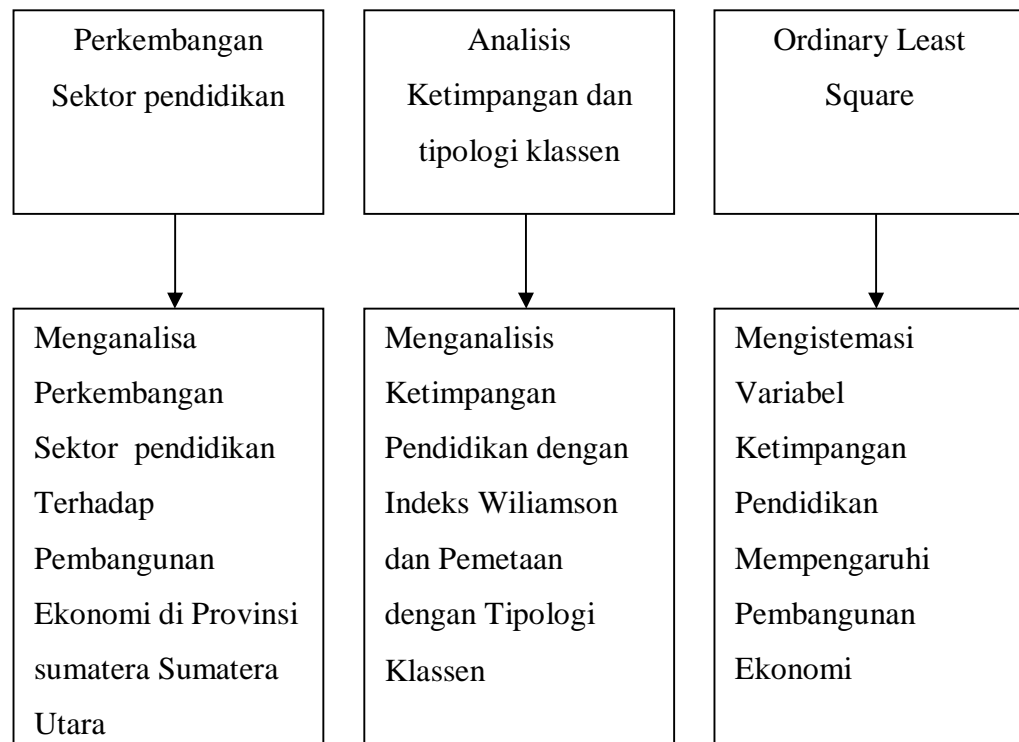
	dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo	$\delta \log$ $Y+2 \log$ $Y+\varepsilon$ \log $GR= \log$ $\varphi + \delta \log$ $Y+2 \log$ $Y+\varepsilon$	Gini Y: PDRB per kapita φ dan δ : kofisien regresi ε : epsilon		tercipta di Provinsi Gorontalo di sebabkan oleh laju pertumbuha n ekonomi sehingga di butuhkan ertumbuhka n ekonomi yang berkualitas cenderung mengaruh pada pemerataan pembangun an dan kesejahteraa n masyarakat.
Trias Dewi Yunisti	Analisi Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten atau Kota Provinsi Banten		PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan		Indeks Williamson menunjukka n nilai yang semakin menurun atau ketimpanga n semakin kecil yang di ukur melalui analisis dengan indeks Theil menunjukka n bahwa sektor ekonomi di provinsi banten semakin menurun.

C. Kerangka Konseptual

Dari Tujuan masalah dan melihat kajian teoritis di atas peneliti mencoba :

1. Menganalisa perkembangan sektor ekonomi terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis ketimpangan pendidikan dengan indeks wiliamson dengan pemetaan dengan tipologi klassen.

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka analisis ketimpangan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi se Sumatera Utara sebagai berikut:

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dilakukan secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketimpangan pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan Ekonomi di kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengistemasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah, data yang disajikan adalah *time series* yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau lokasi tertentu namun dihimpun dari tahun yang berbeda yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lain dapat dihubungkan sehingga peneliti dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan.

Tabel III-1
Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi Operasional	Sumber
Ketimpangan pendidikan	Jumlah Sarana Fisik (gedung sekolah) dan Tenaga Pendidik di Provinsi Sumatera Utara	Badan pusat statistik
Pembangunan ekonomi (PE)	Jumlah Siswa (SD, SMP, SMA dan SMK) di Provinsi Sumatera Utara	Badan pusat statistik

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara, dengan melihat data pendidikan, variabel yang mempengaruhi pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data yang disajikan adalah data dari tahun 2011-2015. waktu

penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu Desember 2016 sampai dengan selesai.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari publikasi resmi yang berasal dari *Badan Pusat Statistik*, jurnal maupun *website* yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan dan mencatat data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang tersedia dari berbagai sumber, salah satunya Badan Pusat Statistik. Data yang diambil berupa data pada periode 2011-2015.

F. Teknis Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat data penel, yaitu *cross section* berupa Sumatra utara serta data *time series* dan penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klasen.

1. Analisis Indeks Williamson

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Indeks Williamson*. Indeks ini digunakan untuk mengukur penyebaran (disperse) tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata rata nasional. Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, *Indeks Williamson* menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar

wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok yang di formulasikan sebagai berikut.

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}}, 0 < I_w < 1. \dots\dots\dots(3-1)$$

Dimana:

I_w = Indeks Williamson

y_i = anggaran kesehatan di kabupaten atau kota i

y = rata-rata anggaran kesehatan di Provinsi Sumatera Utara

f_i = jumlah sarana kesehatan di kabupaten atau kota i

n = jumlah sarana kesehatan di Provinsi Sumatera Utara

Nilai angka indeks (I_w) yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari nol atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

2. Analisis Tipologi Klasen

Analisis Tipologi klasen digunakan untuk memetakan wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi dan ketimpangan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi. Tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama

a. Pertumbuhan Pendidikan dan Pembangunan Pendidikan

Melelui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan srtuktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu:

- 1) Kuadrat I: Daerah maju dan tumbuh cepat (*rapid growth region*), yaitu kabupaten /kota yang laju pertumbuhan Pendidikan dan

Pembangunan pendidikannya lebih tinggi dibanding rata rata Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Kuadrat II: Daerah yang berkembang cepat (*growing region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan pendidikan lebih tinggi, tetapi pembangunan pendidikan lebih rendah dibanding rata rata provinsi sumatera Utara.
- 3) Kuadrat III: Daerah maju tetapi tertekan (*retared region*) yaitu kabupaten kota yang Pembangunan pendidikan lebih tinggi tetapi pertumbuhan pendidikannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Kuadrat IV: Daerah relative tertinggal (*relatively backward region*), yaitu kabupaten /kota yang memiliki pertumbuhan pendidikan dan Pembangunan pendidikannya lebih rendah dibanding rata- rata Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.2
Tipologi daerah Berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Pendapatan

Pembangunan Ekonomi / Pertumbuhan Ekonomi (r)	($yI > y$)	($yI < y$)
($rI > r$)	(kuadrat I) Pembangunan ekonomi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah	(kuadrat II) Pembangunan rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi
($rI < r$)	(kuadrat III) Pembangunan Ekonomi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah	(kuadrat IV) Pembangunan Ekonomi rendah pertumbuhan ekonomi rendah

b. Ketimpangan Pendidikan

Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur ketimpangan ekonomi yang berbeda, yaitu:

- 1) Kuadrat I: Daerah maju dan tumbuh cepat (*rapid growth region*), yaitu kabupaten/kota yang ketimpangan pendidikan tinggi dan jumlah pembangunan pendidikan lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kuadrat II: Daerah yang berkembang cepat (*growing region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki ketimpangan pendidikan lebih tinggi tetapi jumlah pembangunan pendidikan rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Kuadrat III: Daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), yaitu kabupaten/kota yang jumlah pembangunan pendidikan lebih tinggi tetapi ketimpangannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Kuadrat IV: Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki ketimpangan pendidikan dan jumlah pembangunan pendidikan lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3
Tipologi daerah Berdasarkan Ketimpangan Pendidikan dan jumlah Siswa

Pembangunan Ekonomi (Y) Ketimpangan Pendidikan (r)	($yI > y$)	($yI < y$)
($rI > r$)	(kuadrat I) Pembangunan pendidikan Tinggi dan ketimpangan pendidikan tinggi	(kuadrat II) Pembangunan pendidikan rendah dan ketimpangan Pendidikan tinggi
($rI < r$)	(kuadrat III) Pembangunan pendidikan tinggi dan ketimpangan Pendidikan rendah	(kuadrat IV) Pembangunan pendidikan rendah dan ketimpangan pendidikan rendah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara

a. Letak Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur. Dimana sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatra Utara adalah $71.680,68 \text{ Km}^2$, sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun di bagian Timur pantai pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Surnatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten Mandailing Natal dengan luas $6.620,70 \text{ Km}^2$, atau sekitar 9,23% dari total luas Sumatera Utara, diikuti kabupaten Langkat dengan luas $6.263,29 \text{ Km}^2$, kemudian kabupaten Simalunggun dengan luas $4.386,60 \text{ Km}^2$ atau sekitar 6,12%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Sibolga dengan luas $10,77 \text{ Km}^2$ atau sekitar 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam

3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir dan Kota Pematang Siantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

b. Kondisi Iklim Provinsi Sumatera Utara

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 33,40C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhunya minimalnya bisa mencapai 23,70C. Sebagaimana provinsi

lainnya di Indonesia, provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur. Dimana sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatra Utara adalah $71.680,68 \text{ Km}^2$.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi peringkat keempat penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu dengan jumlah penduduk 12.982.204 dari total 237.641.326 penduduk Indonesia atau dengan kata lain Provinsi Sumatera Utara menyumbang sebanyak 5,46% bagi total penduduk Indonesia.

Dengan total penduduk yang tinggi dan perekonomian yang tidak stabil serta ketimpangan distribusi pendapatan maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selain itu juga stabilitas keamanan, tingginya tingkat premanisme dan isu politik di Kota Medan juga sangat mempengaruhi dari tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi nilai PDRB yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 4.1
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku (Milyar Rupiah)
2011	314.372,44
2012	417.120,44
2013	496.464,02
2014	419.649,28
2015	571.722,01

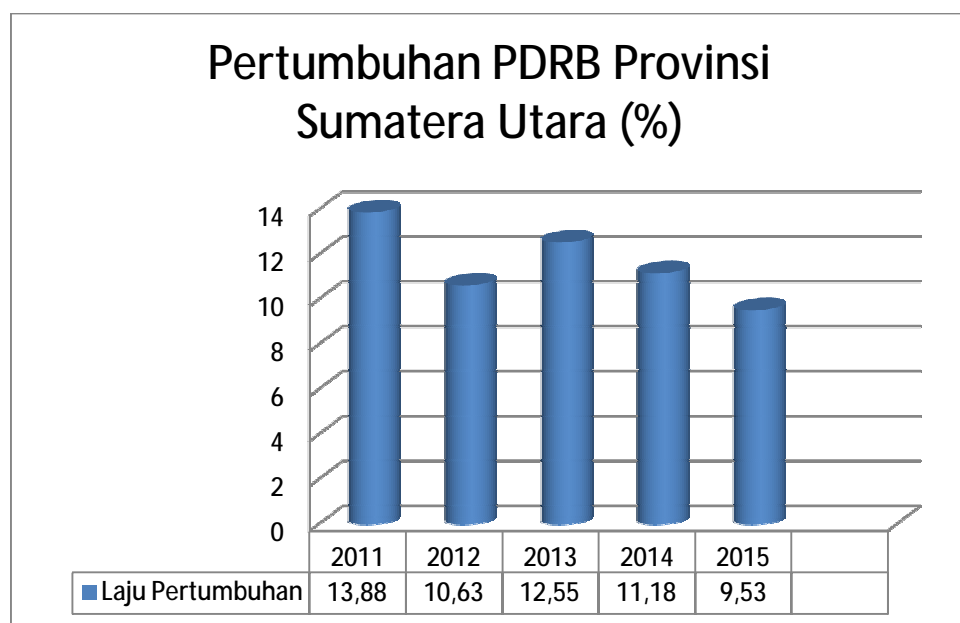
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Dari tabel di atas nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2011-2015 terus mengalami kenaikan tanpa adanya penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik di sektor ekonomi dan sosial, terutama sektor kesehatan dan pendidikan sebagai sektor terpenting dalam langkah mewujudkan pembangunan ekonominya yaitu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembentukan nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor pengkontribusi tertinggi. Hal ini disebabkan karena daerah provinsi Sumatera Utara terutama Kabupaten Kota memiliki keunggulan pertanian dan perkebunan.

b. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan kondisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Utara di atas, setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang naik turun, pertumbuhan PDRB provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

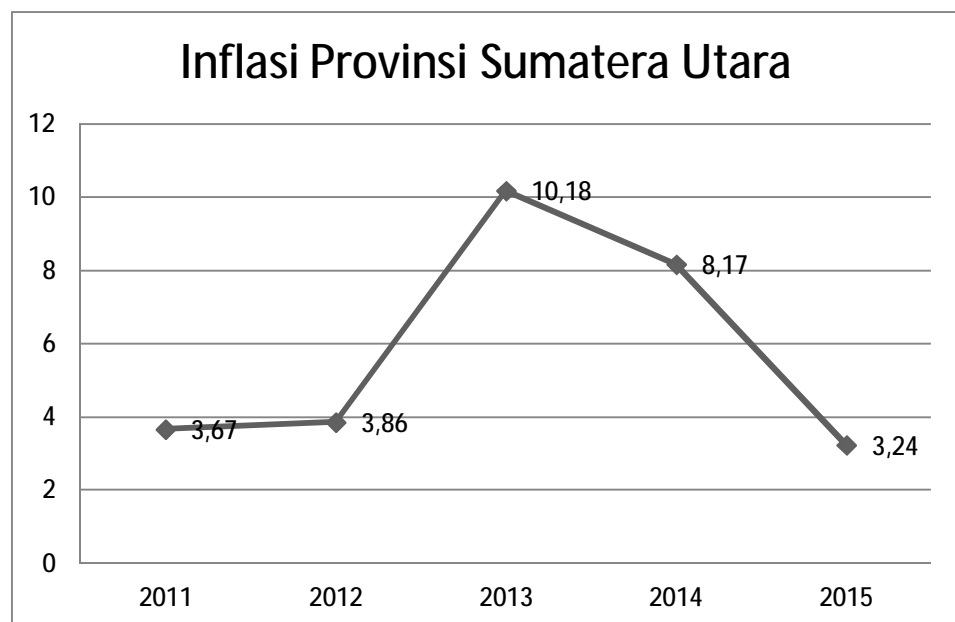
Gambar 4.1
Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan PDRB mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2011-2015 dimana pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,3%, sedangkan pada tahun sebelumnya 11,18%. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB Provinsi

Sumatera Utara mengalami penurunan yaitu pada tahun sebelumnya sebesar 11,18% menurun menjadi 9,3%.

c. Inflasi Provinsi Sumatera Utara

Tingkat inflasi menunjukkan seberapa kenaikan harga-harga barang dalam kurun waktu yang panjang, ataupun tingkat inflasi menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam membeli atau mengkonsumsi barang.



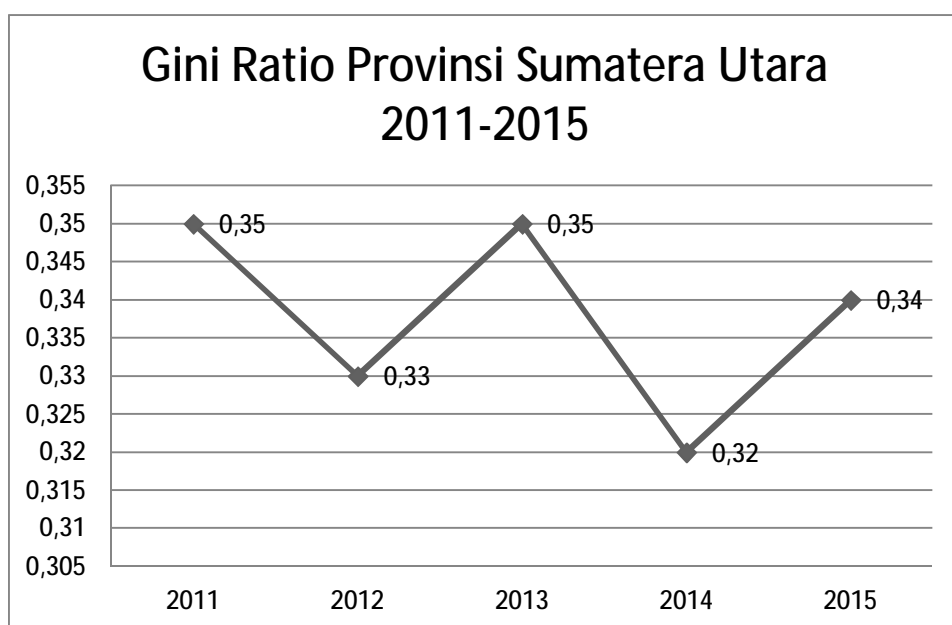
Gambar 4.2
Pertumbuhan Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2015 tingkat inflasi mengalami gerak fluktuasi, dimana pada tahun 2011 terjadi peningkatan yaitu tingkat inflasi tahun 2011 sebesar 3,67 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 3,86. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga berimbas pada tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara dimana terjadi peningkatan yang signifikan dan sebagai tingkat inflasi tertinggi yaitu

pada tahun 2013 sebesar 10,18% dan menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 8,17%, dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 3,24%.

d. Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara

Ketimpangan ekonomi yang tinggi di suatu Provinsi itu disebabkan oleh salah satunya pembangunan ekonomi yang tidak merata di setiap kabupaten/kota tersebut, Ketimpangan ekonomi ini diwakili dengan Gini Ratio yang persebarannya dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 4.3
Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Dari gambar 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketimpangan ekonomi untuk Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2011-2015 nilai dari gini ratio Provinsi Sumatera Utara berada diatas 0,3. Nilai gini ratio tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,35. Nilai gini ratio yang telah mencapai angka 0,3 dapat dikategorikan daerah tersebut dengan keadaan ketimpangan yang

tinggi atau moderat. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara dengan 33 Kabupaten Kota terjadi ketimpangan dalam pembangunan dan ekonomi, dimana daerah seperti Kota Medan pembangunannya sangat cepat tapi tidak sebanding dengan daerah Kabupaten Kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dari gambar di atas jelas terlihat bahwa sepanjang tahun 2011-2015 tingkat ketimpangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara berada dalam keadaan ketimpangan yang menengah atau sedang. Sebab berdasarkan teori Corrado Gini apabila nilai gini ratio berada diantara 0-0,3 maka dikategorikan dengan ketimpangan yang rendah, nilai indeks berada 0,3-0,5 berada pada kategori sedang atau menengah, sedangkan apabila $> 0,5$ maka dikategorikan ketimpangan yang tinggi.

3. Kondisi Sosial Provinsi Sumatera Utara

a. Jumlah Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara

Perfumbuhan penduduk Provinsi Sumatera sepanjang tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan, pertumbuhan penduduk terjadi di setiap wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terbagi menjadi 33 wilayah Kabupaten Kota. Tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan banyak dampak negatif seperti pengangguran, kepadatan penduduk, dan tingginya kemiskinan. Tapi bukan berarti tingginya jumlah penduduk tidak mampu memberikan dampak yang positif, dampak positif dapat diberikan apabila kualitas sumber daya manusianya dapat ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan produktivitas daerah tersebut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (Jiwa)

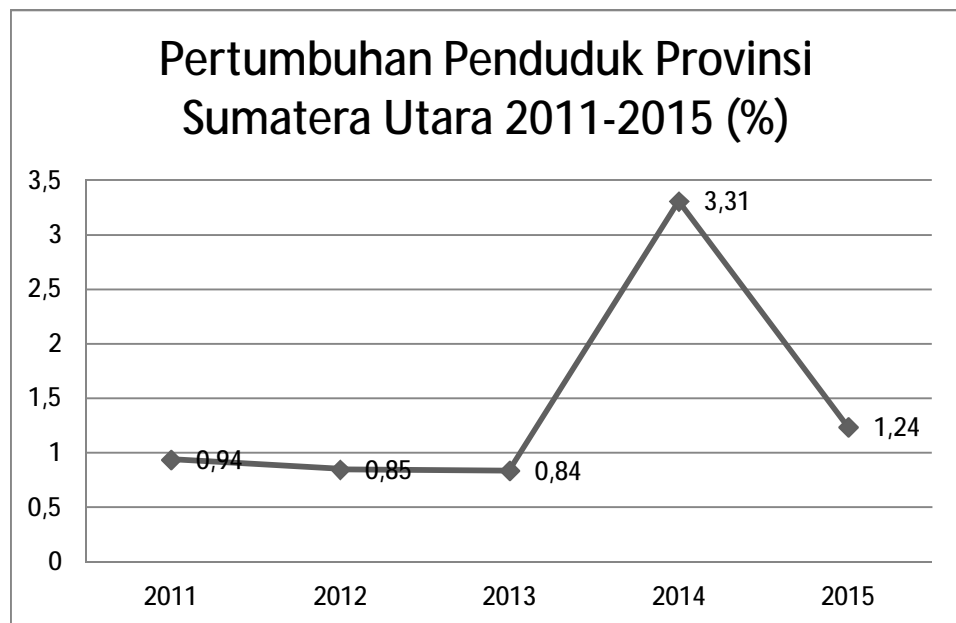
Tahun	Jumlah Penduduk
2011	13103596
2012	13215401
2013	13326307
2014	13766851
2015	13937797

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 4.4 di atas jelas terlihat bahwa sepanjang tahun 2011-2015 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan tanpa ada penurunan sedikitpun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi, tingginya penduduk suatu daerah menunjukkan bahwasanya produktivitas masyarakat daerah tersebut sangat rendah, sebab apabila masyarakat suatu daerah sudah memiliki perekonomian yang baik dengan produktivitas tinggi maka akan mengurangi produktivitas dalam angka kelahiran.

b. Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan kondisi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera pada tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011-2105, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Dari gambar di atas terlihat bahwa sepanjang tahun 2011-2015 angka jumlah penduduk mengalami fluktuasi, akan tetapi dalam penghitungan pertumbuhan menunjukkan bahwasanya peningkatan angka jumlah penduduk tidak begitu signifikan, terlihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 0,94% 0,85% pada 2012, dan 0,84% pada tahun 2013. Akan tetapi ledakan jumlah penduduk yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014 bahkan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sebelumnya 0,84% merupakan pertumbuhan terendah meningkat drastis menjadi 3,31%. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk dari provinsi lain menuju Provinsi Sumatera Utara demi rujukan mendapatkan lapangan pekerjaan demi ekonomi yang lebih

baik. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 1,24%.

c. Tingkat Kemiskinan (*Poverty*) di Provinsi Sumatera Utara

Angka kemiskinan diperoleh dengan melihat seberapa besar jumlah ataupun persentase penduduk suatu daerah yang terjatuh di dalam garis kemiskinan (*Poverty line*) yang selalu konstan secara real. Semakin tingginya jumlah penduduk miskin maka akan memperbesar peluang untuk terjadinya tingkat kriminalitas yang tinggi.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

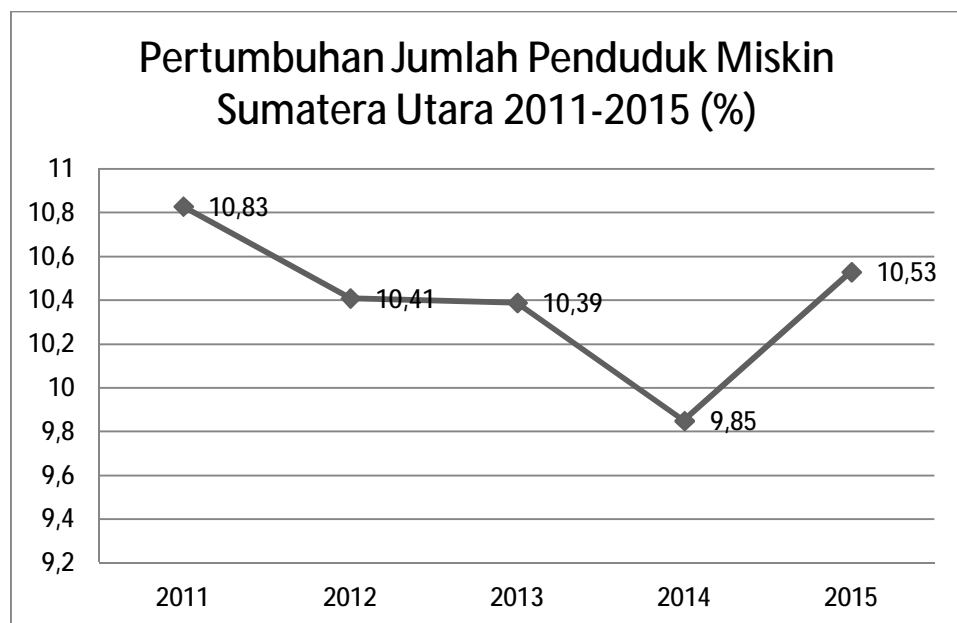
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2011	1.421.400
2012	1.400.400
2013	1.416.400
2014	1.360.600
2015	1.508.100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2011-2015, dimana tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.416.400 jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 1.360.600. Hal ini karena penduduk masyarakat provinsi Sumatera Utara banyak yang telah melampaui garis kemiskinan (*Poverty line*) yang telah ditetapkan.

d. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (*Poverty*) di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan kondisi tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Sumatera pada tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Pertumbuhan tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011-2015, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Gambar. 4.5
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2011 merupakan tahun dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,83%. Selepas tahun 2011 pertumbuhan penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun 2012-2014.

Tahun 2014 merupakan tahun dengan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 9,85%. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera masih tergolong sangat tinggi karena telah mencapai hingga melebihi angka 10%. Hal ini disebabkan oleh tingkat penduduk Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi terutama yang termasuk dalam usia produktif angkatan kerja tetapi tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja. Sehingga banyak masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang terjerat di dalam garis kemiskinan. Maka pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menciptakan regulasi yang tepat agar dapat mengentaskan kemiskinan baik di lapangan baik juga secara data yang dipublikasikan.

e. Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara

Pengangguran yang tinggi di suatu daerah dapat disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang produktif ataupun siap untuk bekerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Tabel 4.4
Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

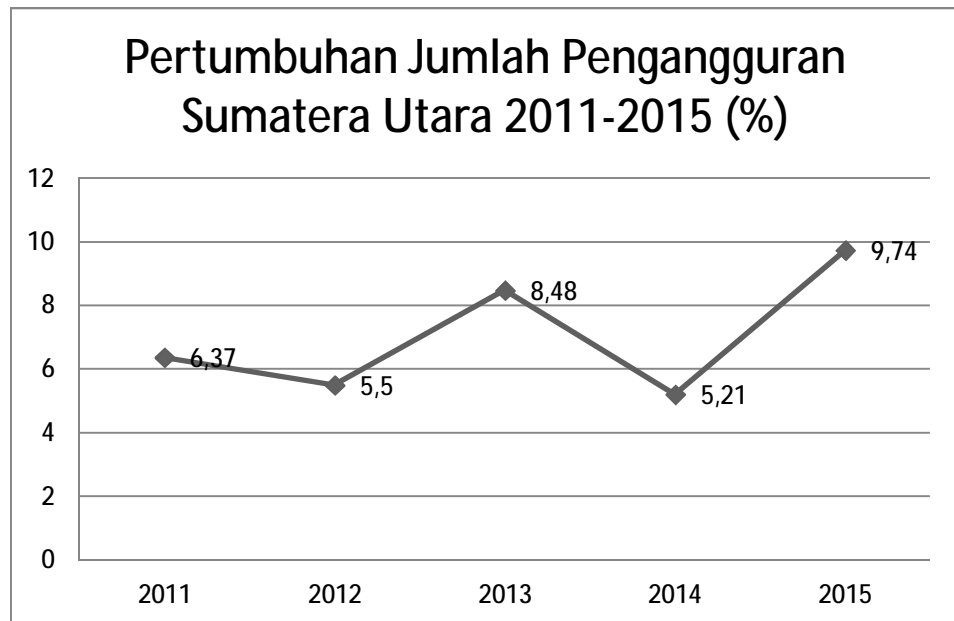
Tahun	Jumlah Pengangguran
2011	402125
2012	379982
2013	412202
2014	390712
2015	428794

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2011-2015, dimana pada tahun 2012 merupakan tahun dengan jumlah pengangguran terendah yaitu 379982 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dimana pada tahun 2012 merupakan tahun terendah untuk jumlah pengangguran di Sumatera Utara yaitu sebanyak 379982 jiwa, akan tetapi pada tahun 2015 menjadi 428794 jiwa. Menurun secara signifikannya jumlah pengangguran pada tahun 2012 disebabkan karena pada tahun 2012 banyak lapangan pekerjaan yang meminta tenaga kerja melalui lulusan Sekolah Menengah Atas yang merupakan lulusan terbanyak di Provinsi Sumatera Utara.

f. Pertumbuhan Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan kondisi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera pada tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Pertumbuhan Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011-2015, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Gambar. 4.6
Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Dari gambar 4.6 di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 5,21%, yang selanjutnya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 menjadi 9,74%. Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera sudah termasuk dalam kategori menengah sepanjang tahun 2011-2015, sebab sudah berada di angka 6-70, sebab tingkat pengangguran dikatakan tinggi apabila sudah mencapai angka 10%. Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat inflasi, dimana Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat inflasi yang rendah secara otomatis akan meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini karena apabila tingkat inflasi rendah maka harga barang-barang cenderung rendah dan para produsen tentu tidak akan

menambah produksi barang dan juga akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pengangguran.

g. Kondisi Human Development Indeks (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Sumatera Utara

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kondisi IPM di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2011	67,34
2012	67,74
2013	68,36
2014	68,87
2015	69,51

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, indeks pembangunan manusia terendah ditetapkan pada tahun 2011 yaitu 67,34, pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 67,74 pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013-2015 mengalami kenaikan menjadi 69,51.

1) Indeks Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan untuk target usia tertinggi masyarakatnya. Semakin tinggi usia angka harapan hidup suatu daerah maka menunjukkan semakin baik sektor kesehatan suatu daerah. Apabila angka harapan hidup berada di bawah atau pada saat usia produktif, hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat rendah produktifitasnya, karena apabila disaat usia produktif seseorang sudah meninggal maka hal ini menjadi masalah berat

bagi daerah tersebut karena akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.6
Persentase Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup
2011	69,5
2012	67,81
2013	67,94
2014	68,04
2015	68,29

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka harapan hidup Provinsi Sumatera Utara mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan, angka harapan hidup tertinggi ditetapkan pada tahun 2011 yaitu 69,5 tahun, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu hanya 67,81 tahun pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 67,94 tahun dan 68,04 tahun akan tetapi belum mampu seperti tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka 69 tahun.

2) PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) merupakan salah satu indikator yang harus ditingkatkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat suatu daerah, dimana produktivitas atau tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah atau Provinsi ditingkatkan dengan mengoptimalkan faktor-faktor produksi dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan

yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di suatu daerah.

Tabel 4.7
PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2011	26.711,24
2012	28.036,88
2013	29.339,21
2014	30.477,07
2015	31.637,41

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2011-2015. Nilai PDRB perkapita yang terus meningkat seharusnya juga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan PDRB perkapita adalah melalui meningkatkan upah minimum regional (LMR), dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka memungkinkan untuk mampu meningkatkan kualitas masyarakat sebab masyarakat dengan ekonomi yang lebih baik akan memperdulikan pendidikan. Diharapkan dengan kondisi ekonomi yang baik maka masyarakat mampu untuk menjaga kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga terutama anak-anaknya, sebab kesehatan dan pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia-

yang berkualitas hingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

4. Kondisi Sarana Fisik dan Tenaga Pendidik pada Sektor Pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

a. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

Jumlah Sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Jumlah Sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

2011					
Kabupaten/Kota	Sekolah				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	486	37	6	11	540
2. Mandailing Natal	399	113	46	15	573
3. Tapanuli Selatan	303	76	28	12	419
4. Tapanuli Tengah	348	89	30	19	486
5. Tapanuli Utara	388	78	24	21	511
6. Toba Samosir	232	43	15	19	309
7. Labuhanbatu	351	170	88	24	633
8. Asahan	480	172	79	30	761
9. Simalungun	855	188	70	39	1.152
10. Dairi	270	62	27	11	370
11. Karo	292	68	28	12	400
12. Deli Serdang	1.446	341	151	137	2.075
13. Langkat	630	251	106	45	1.032
14. Nias Selatan	344	123	41	46	554
15. Humbang Hasundutan	222	44	16	12	294
16. Pakpak Bharat	57	29	6	1	93
17. Samosir	202	35	14	7	258
18. Serdang Bedagai	441	141	61	31	674
19. Batu Bara	244	87	36	13	380
20. Padang Lawas Utara	233	80	43	5	361
21. Padang Lawas	184	61	23	8	276
22. Labuhanbatu Selatan	202	82	39	14	337
23. Labuhanbatu Utara	308	94	32	14	448
24. Nias Utara	185	39	9	19	252
25. Nias Barat	103	38	12	11	164
Kota					
71. Sibolga	60	17	11	8	96
72. Tanjungbalai	99	29	18	6	152
73. Pematangsiantar	148	50	35	35	268
74. Tebing Tinggi	97	25	22	13	157

2012					
Kabupaten/Kota	Sekolah				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	147	47	6	13	213
2. Mandailing Natal	403	80	22	18	523
3. Tapanuli Selatan	285	71	27	12	395
4. Tapanuli Tengah	552	90	31	9	682
5. Tapanuli Utara	386	80	25	21	512
6. Toba Samosir	233	43	16	19	311
7. Labuhanbatu	277	58	25	23	383
8. Asahan	503	117	79	31	730
9. Simalungun	833	143	51	39	1.066
10. Dairi	270	61	27	11	369
11. Karo	292	70	27	12	401
12. Deli Serdang	802	247	106	117	1.272
13. Langkat	611	151	62	50	874
14. Nias Selatan	340	118	40	44	542
15. Humbang Hasundutan	222	44	17	12	295
16. Pakpak Bharat	66	29	6	1	102
17. Samosir	203	34	14	7	258
18. Serdang Bedagai	492	144	38	-	674
19. Batu Bara	276	92	36	14	418
20. Padang Lawas Utara	231	40	43	6	320
21. Padang Lawas	-	-	-	-	0
22. Labuhanbatu Selatan	179	43	14	16	252
23. Labuhanbatu Utara	-	-	-	-	0
24. Nias Utara	162	43	9	19	233
25. Nias Barat	103	34	12	11	160
Kota					
71. Sibolga	-	14	9	-	23
72. Tanjungbalai	97	30	18	7	152
73. Pematangsiantar	156	41	30	34	261
74. Tebing Tinggi	102	32	22	14	170

75. Medan	1.717	418	223	144	2.502
76. Binjai	161	47	22	24	254
77. Padangsidempuan	97	37	26	16	176
78. Gunungsitoli	109	37	15	12	173
Sumatera Utara	11.693	3.201	1.402	834	17.130

75. Medan	870	415	223	144	1.652
76. Binjai	161	50	32	22	265
77. Padangsidempuan	94	25	18	16	153
78. Gunungsitoli	119	38	15	13	185
Sumatera Utara	9.467	2.524	1.100	755	13.846

2013					
Kabupaten/Kota	Sekolah				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	147	47	5	14	213
2. Mandailing Natal	397	80	22	15	514
3. Tapanuli Selatan	281	48	10	15	354
4. Tapanuli Tengah	304	72	18	17	411
5. Tapanuli Utara	386	78	22	23	509
6. Toba Samosir	221	45	13	18	297
7. Labuhanbatu	278	61	28	32	399
8. Asahan	428	99	35	25	587
9. Simalungun	838	143	34	38	1.053
10. Dairi	259	59	22	12	352
11. Karo	285	64	19	10	378
12. Deli Serdang	800	251	125	138	1.314
13. Langkat	618	154	24	43	839
14. Nias Selatan	348	114	27	30	519
15. Humbang Hasundutan	218	42	16	12	288
16. Pakpak Bharat	57	26	2	1	86
17. Samosir	202	34	13	7	256
18. Serdang Bedagai	450	85	37	34	606
19. Batu Bara	240	51	21	14	326
20. Padang Lawas Utara	206	36	5	6	253
21. Padang Lawas	183	35	6	13	237
22. Labuhanbatu Selatan	185	44	13	17	259
23. Labuhanbatu Utara	286	46	15	14	361
24. Nias Utara	153	45	7	18	223
25. Nias Barat	105	40	10	9	164
Kota					
71. Sibolga	55	14	8	8	85
72. Tanjungbalai	73	18	11	6	108
73. Pematangsiantar	156	41	30	33	260
74. Tebing Tinggi	93	24	15	11	143
75. Medan	824	360	201	144	1.529
76. Binjai	155	44	26	23	248
77. Padangsidempuan	94	24	18	16	152
78. Gunungsitoli	107	33	10	12	162
Sumatera Utara	9.432	2.357	868	828	13.485

2014					
Kabupaten/Kota	Sekolah				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	154	48	7	15	224
2. Mandailing Natal	398	81	22	20	521
3. Tapanuli Selatan	284	48	12	15	359
4. Tapanuli Tengah	304	77	25	20	426
5. Tapanuli Utara	385	78	25	23	511
6. Toba Samosir	222	48	18	24	312
7. Labuhanbatu	281	65	30	36	412
8. Asahan	431	100	43	38	612
9. Simalungun	829	147	52	43	1.071
10. Dairi	263	62	25	4	354
11. Karo	287	65	24	15	391
12. Deli Serdang	814	259	132	161	1.366
13. Langkat	623	150	63	56	892
14. Nias Selatan	344	124	51	46	565
15. Humbang Hasundutan	218	43	16	8	285
16. Pakpak Bharat	57	26	5	3	91
17. Samosir	203	34	15	7	259
18. Serdang Bedagai	460	82	39	36	617
19. Batu Bara	241	51	22	6	320
20. Padang Lawas Utara	211	38	11	8	268
21. Padang Lawas	180	37	9	15	241
22. Labuhanbatu Selatan	190	46	14	19	269
23. Labuhanbatu Utara	288	46	15	15	364
24. Nias Utara	161	48	7	22	238
25. Nias Barat	103	37	12	12	164
Kota					
71. Sibolga	55	14	9	8	86
72. Tanjungbalai	75	18	11	9	113
73. Pematangsiantar	159	41	30	35	265
74. Tebing Tinggi	94	24	15	17	150
75. Medan	831	366	213	155	1.565
76. Binjai	159	47	27	25	258
77. Padangsidempuan	94	24	18	18	154
78. Gunungsitoli	104	32	12	13	161
Sumatera Utara	9.502	2.406	1.029	947	13.884

2015					
Kabupaten/Kota	Sekolah				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	158	49	10	16	233
2. Mandailing Natal	399	82	23	20	524
3. Tapanuli Selatan	284	48	12	15	359
4. Tapanuli Tengah	305	74	22	20	421
5. Tapanuli Utara	384	79	25	23	511
6. Toba Samosir	222	48	16	21	307
7. Labuhanbatu	281	65	30	30	406
8. Asahan	434	101	43	39	617
9. Simalungun	817	147	51	40	1.055
10. Dairi	262	62	23	15	362
11. Karo	287	64	24	15	390
12. Deli Serdang	829	266	129	132	1.356
13. Langkat	625	150	63	57	895
14. Nias Selatan	351	129	55	46	581
15. Humbang Hasundutan	218	43	15	14	290
16. Pakpak Bharat	58	25	5	3	91
17. Samosir	203	34	15	7	259
18. Serdang Bedagai	460	84	39	36	619
19. Batu Bara	241	52	21	18	332
20. Padang Lawas Utara	214	40	11	7	272
21. Padang Lawas	181	37	9	13	240
22. Labuhanbatu Selatan	189	46	16	19	270
23. Labuhanbatu Utara	288	46	15	16	365
24. Nias Utara	161	51	11	23	246
25. Nias Barat	103	38	12	11	164
Kota					
71. Sibolga	55	15	9	8	87
72. Tanjungbalai	75	19	11	8	113
73. Pematangsiantar	159	41	30	35	265
74. Tebing Tinggi	94	24	15	17	150
75. Medan	830	362	213	157	1.562
76. Binjai	159	46	27	23	255
77. Padangsidempuan	94	24	18	17	153
78. Gunungsitoli	104	33	11	13	161
Sumatera Utara	9.524	2.424	1.029	934	13.911

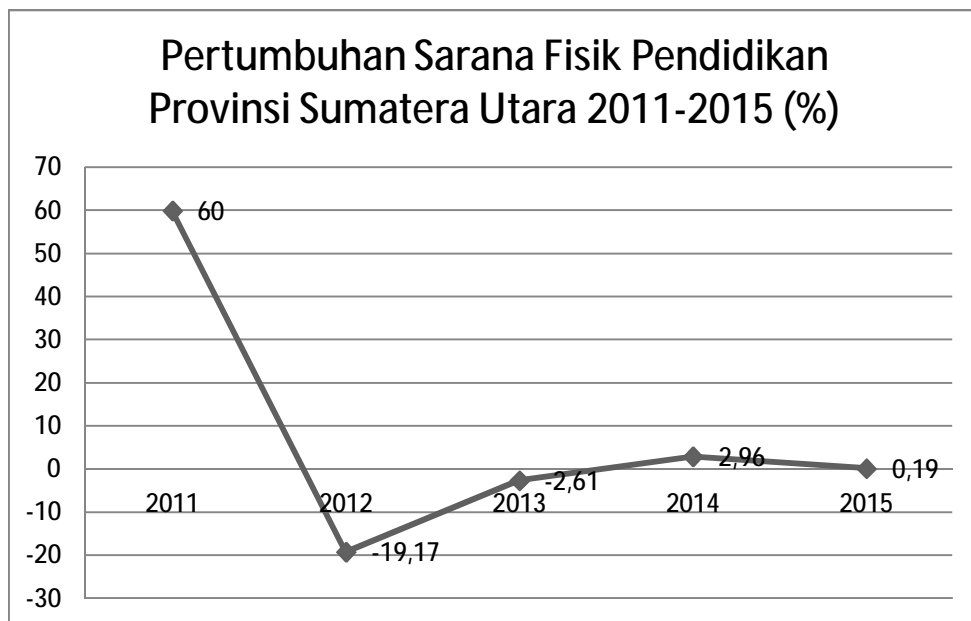
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Dari tabel 4.8 di atas pada tahun 2011 Kabupaten Pakpak Bharat adalah adalah kabupaten/kota dengan sarana fisik sektor pendidikan terendah yaitu hanya memiliki 93 buah sekolah. Dengan total hanya 93 sarana fisik pendidikan yang tersedia maka Kabupaten Pakpak Bharat dapat dikategorikan sebagai Kota dengan ketimpangan sektor pendidikan

tertinggi pada tahun 2011 dibandingkan dengan 32 Kabupaten Kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2012 Kabupaten Pakpak Bharat mengalami penurunan dalam hal fasilitas sarana fisik di sektor pendidikan. Dimana pada tahun sebelumnya Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 93 buah bangunan sekolah sehingga pada tahun 2012 Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 102 buah bangunan sekolah. Hal ini dapat terjadi apabila sarana pendukung pendidikan tersebut bermasalah dalam hal izin dan juga menegemen yang buruk dalam pengelolaannya.

Tahun 2013-2015 Kota Sibolga menempati daerah terendah yang memiliki sarana fisik di Provinsi Sumatera Utara, yaitu hanya memiliki 85 sarana pendukung pendidikan (bangunan sekolah) pada tahun 2013. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 86 gedung pendidikan dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 87 gedung sarana fisik pendidikan.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Gambar. 4.7 Pertumbuhan Sarana Fisik Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Dari gambar 4.9 di atas terlihat bahwa sarana fisik pendidikan di Provinsi Sumatera Utara mengalami pergerakan yang fluktuatif sepanjang tahun 2011 hingga 2015. Pertumbuhan sarana fisik pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari jumlah bangunan sekolah SD, SMP, SMA dan SMK pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 60,00% dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya mencapai -19,17% atau dengan kata lain pertumbuhannya disebabkan berkurangnya sarana fisik pendidikan di beberapa wilayah kabupaten kota, hal ini disebabkan karena banyak sarana fisik yang berhenti beroperasi atau dialihfungsikan menjadi sarana fisik lain. Pada tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar -2,61% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan 2,61% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan 0,19% dari tahun sebelumnya.

sebesar 2,96% dan tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 0,19%.

b. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru SD, SMP, SMA dan SMK) di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

Selain sarana fisik di atas, tenaga pendidik seperti guru SD, SMP, SMA dan SMK dan kuantitas juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Tenaga pendidik yang berkualitas dapat mendidik masyarakat untuk menjadi lebih baik. Diharapkan dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas kerja masyarakat.

Tenaga pendidik hendaklah tersebar secara merata baik di daerah Kota ataupun Kabupaten yang berada di pedalaman agar pendidikan masyarakat yang baik juga merata. Salah satu bentuk pemerataan program pembangunan adalah melalui program pemerataan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik demi tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia, serta infrastruktur demi mendukung sarana akses juga ditingkatkan agar tenaga para pendidik tidak memilih daerah kota yang layak saja, melainkan seluruh daerah di Sumatera Utara.

Tabel 4.9
Jumlah Guru di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

2011					
Kabupaten/Kota	Jumlah Guru				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	1.730	582	112	220	2.644
2. Mandailing Natal	4.848	2.274	1.140	506	8.768
3. Tapanuli Selatan	2.810	1.308	586	247	4.951
4. Tapanuli Tengah	3.659	1.813	776	424	6.672
5. Tapanuli Utara	3.232	1.075	693	628	5.628
6. Toba Samosir	1.909	995	457	503	3.864
7. Labuhanbatu	3.465	1.451	977	722	6.615
8. Asahan	5.662	3.037	1.483	702	10.884
9. Simalungun	9.384	3.624	1.617	824	15.449
10. Dairi	2.928	1.288	649	325	5.190
11. Karo	2.827	1.680	901	494	5.902
12. Deli Serdang	11.128	6.991	3.381	3.459	24.959
13. Langkat	7.890	4.431	3.106	824	16.251
14. Nias Selatan	5.459	1.743	397	673	8.272
15. Humbang Hasundutan	2.083	867	503	369	3.822
16. Pakpak Bharat	801	400	217	56	1.474
17. Samosir	1.639	657	353	232	2.881
18. Serdang Bedagai	4.767	1.170	1.344	683	7.964
19. Batu Bara	3.390	711	450	57	4.608
20. Padang Lawas Utara	2.348	1.000	619	114	4.081
21. Padang Lawas	2.324	2.592	385	204	5.505
22. Labuhanbatu Selatan	2.040	1.187	374	126	3.727
23. Labuhanbatu Utara	3.501	1.311	543	332	5.687
24. Nias Utara	1.973	596	147	302	3.018
25. Nias Barat	1.477	543	199	180	2.399
Kota					
71. Sibolga	712	317	197	229	1.455
72. Tanjungbalai	1.158	767	485	168	2.578
73. Pematangsiantar	1.879	1.511	1.293	1.069	5.752
74. Tebing Tinggi	727	521	609	475	2.332
75. Medan	10.951	9.904	6.622	4.236	31.713
76. Binjai	2.050	1.306	1.078	728	5.162
77. Padangsidimpuan	1.718	1.216	867	695	4.496
78. Gunungsitoli	1.299	850	431	448	3.028
Sumatera Utara	113.768	59.718	32.991	21.254	227.731

2012					
Kabupaten/Kota	Jumlah Guru				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	1.632	660	122	209	2.623
2. Mandailing Natal	4.848	1.207	544	546	7.145
3. Tapanuli Selatan	3.249	1.364	559	135	5.307
4. Tapanuli Tengah	4.033	1.655	14	141	5.843
5. Tapanuli Utara	3.232	1.448	706	482	5.868
6. Toba Samosir	2.120	1.066	542	574	4.302
7. Labuhanbatu	3.220	967	556	574	5.317
8. Asahan	790	3.814	1.848	862	7.314
9. Simalungun	7.357	2.892	1.367	954	12.570
10. Dairi	2.817	1.278	647	363	5.105
11. Karo	3.066	1.725	896	499	6.186
12. Deli Serdang	10.985	5.814	2.633	2.848	22.280
13. Langkat	7.196	3.092	1.648	1.507	13.443
14. Nias Selatan	-	-	-	-	-
15. Humbang Hasundutan	2.260	954	521	372	4.107
16. Pakpak Bharat	756	341	20	16	1.133
17. Samosir	1.638	654	358	223	2.873
18. Serdang Bedagai	5.204	2.724	-	-	7.928
19. Batu Bara	3.460	1.290	316	365	5.431
20. Padang Lawas Utara	820	602	295	146	1.863
21. Padang Lawas	-	-	-	-	-
22. Labuhanbatu Selatan	2.135	698	320	261	3.414
23. Labuhanbatu Utara	-	-	-	-	-
24. Nias Utara	1.944	802	143	261	3.150
25. Nias Barat	1.396	542	227	236	2.401
Kota					
71. Sibolga	953	542	-	-	1.495
72. Tanjungbalai	1.286	770	488	181	2.725
73. Pematangsiantar	1.876	1.385	1.046	930	5.237
74. Tebing Tinggi	1.242	780	549	480	3.051
75. Medan	14.374	10.219	6.844	4.379	35.816
76. Binjai	2.048	1.279	1.050	564	4.941
77. Padangsidimpuan	1.412	884	529	297	3.122
78. Gunungsitoli	1.285	662	281	353	2.581
Sumatera Utara	98.634	52.110	25.069	18.758	194.571

2013					
Kabupaten/Kota	Jumlah Guru				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	1.957	647	42	112	2.758
2. Mandailing Natal	5.185	1.795	473	411	7.864
3. Tapanuli Selatan	2.751	1.133	222	125	4.231
4. Tapanuli Tengah	3.706	1.554	357	250	5.867
5. Tapanuli Utara	3.726	1.787	461	507	6.481
6. Toba Samosir	2.116	1.113	311	330	3.870
7. Labuhanbatu	3.856	1.327	687	643	6.513
8. Asahan	5.481	2.373	634	220	8.708
9. Simalungun	8.487	3.424	702	674	13.287
10. Dairi	3.034	1.507	404	269	5.214
11. Karo	3.354	1.856	444	208	5.862
12. Deli Serdang	12.635	6.646	1.911	2.515	23.707
13. Langkat	8.406	3.468	264	329	12.467
14. Nias Selatan	3.895	1.694	204	165	5.958
15. Humbang Hasundutan	2.293	1.099	408	312	4.112
16. Pakpak Bharat	758	471	25		1.254
17. Samosir	1.905	791	200	138	3.034
18. Serdang Bedagai	5.273	2.102	577	375	8.327
19. Batu Bara	3.198	1.488	355	197	5.238
20. Padang Lawas Utara	2.473	669	84	45	3.271
21. Padang Lawas	2.176	653	67	209	3.105
22. Labuhanbatu Selatan	2.227	813	126	77	3.243
23. Labuhanbatu Utara	3.383	986	186	296	4.851
24. Nias Utara	2.053	780	130	251	3.214
25. Nias Barat	1.417	533	92	108	2.150
Kota					
71. Sibolga	1.022	480	200	279	1.981
72. Tanjungbalai	1.311	691	238	38	2.278
73. Pematangsiantar	2.150	1.674	1.046	708	5.578
74. Tebing Tinggi	1.580	871	423	204	3.078
75. Medan	14.402	9.971	4.895	2.980	32.248
76. Binjai	2.323	1.482	587	367	4.759
77. Padangsidempuan	1.838	945	528	560	3.871
78. Gunungsitoli	1.757	740	226	276	2.999
Sumatera Utara	122.128	57.563	17.509	14.178	211.378

2014					
Kabupaten/Kota	Jumlah Guru				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	1.860	641	167	278	2.946
2. Mandailing Natal	5.012	1.703	623	721	8.059
3. Tapanuli Selatan	2.744	1.102	323	460	4.629
4. Tapanuli Tengah	3.505	1.479	650	530	6.164
5. Tapanuli Utara	3.543	1.554	772	649	6.518
6. Toba Samosir	1.987	1.018	498	545	4.048
7. Labuhanbatu	3.366	1.169	865	794	6.194
8. Asahan	4.945	1.964	1.019	987	8.915
9. Simalungun	7.738	3.133	1.403	1.054	13.328
10. Dairi	2.884	1.339	645	463	5.331
11. Karo	3.111	1.667	880	528	6.186
12. Deli Serdang	11.212	6.073	2.563	3.704	23.552
13. Langkat	7.605	3.286	1.413	1.343	13.647
14. Nias Selatan	3.494	1.788	854	817	6.953
15. Humbang Hasundutan	2.107	942	580	483	4.112
16. Pakpak Bharat	684	382	167	90	1.323
17. Samosir	1.830	653	382	237	3.102
18. Serdang Bedagai	4.882	1.869	997	847	8.595
19. Batu Bara	2.984	1.152	561	503	5.200
20. Padang Lawas Utara	2.396	646	255	173	3.470
21. Padang Lawas	2.121	620	267	311	3.319
22. Labuhanbatu Selatan	2.096	674	391	396	3.557
23. Labuhanbatu Utara	3.175	887	517	472	5.051
24. Nias Utara	2.131	811	171	491	3.604
25. Nias Barat	1.402	625	236	208	2.471
Kota					
71. Sibolga	944	405	268	356	1.973
72. Tanjungbalai	948	492	393	219	2.052
73. Pematangsiantar	1.789	1.372	1.129	123	4.413
74. Tebing Tinggi	1.136	642	473	603	2.854
75. Medan	13.147	8.811	5.269	857	28.084
76. Binjai	2.105	1.428	941	817	5.291
77. Padangsidempuan	1.658	862	671	690	3.881
78. Gunungsitoli	1.617	703	282	439	3.041
Sumatera Utara	112.158	51.892	26.625	21.188	211.863

2015					
Kabupaten/Kota	Jumlah Guru				Total
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kabupaten					
1. Nias	1.549	602	154	248	2.553
2. Mandailing Natal	4.228	1.466	607	544	6.845
3. Tapanuli Selatan	2.184	958	286	353	3.781
4. Tapanuli Tengah	2.652	1.150	442	348	4.592
5. Tapanuli Utara	2.454	1.293	680	467	4.894
6. Toba Samosir	1.556	842	424	410	3.232
7. Labuhanbatu	2.632	875	634	363	4.504
8. Asahan	3.932	1.478	772	638	6.820
9. Simalungun	6.162	2.374	1.031	687	10.254
10. Dairi	2.056	1.052	417	363	3.888
11. Karo	2.592	1.388	714	285	4.979
12. Deli Serdang	8.890	3.749	1.622	1.649	15.910
13. Langkat	5.983	2.322	907	827	10.039
14. Nias Selatan	1.807	1.241	628	540	4.216
15. Humbang Hasundutan	1.736	861	434	387	3.418
16. Pakpak Bharat	591	309	138	60	1.098
17. Samosir	1.401	569	309	175	2.454
18. Serdang Bedagai	3.980	1.357	661	568	6.566
19. Batu Bara	2.521	949	353	286	4.109
20. Padang Lawas Utara	1.982	613	281	122	2.998
21. Padang Lawas	1.751	556	217	253	2.777
22. Labuhanbatu Selatan	1.861	539	319	171	2.890
23. Labuhanbatu Utara	2.562	674	394	302	3.932
24. Nias Utara	1.745	681	144	347	2.917
25. Nias Barat	1.141	484	241	208	2.074
Kota					
71. Sibolga	791	351	241	281	1.664
72. Tanjungbalai	864	433	286	150	1.733
73. Pematangsiantar	1.574	1.143	800	788	4.305
74. Tebing Tinggi	991	524	375	425	2.315
75. Medan	10.541	5.463	3.606	2.799	22.409
76. Binjai	1.842	1.001	718	431	3.992
77. Padangsidimpuan	1.364	696	512	504	3.076
78. Gunungsitoli	1.365	644	219	304	2.532
Sumatera Utara	89.280	38.637	19.566	16.283	163.766

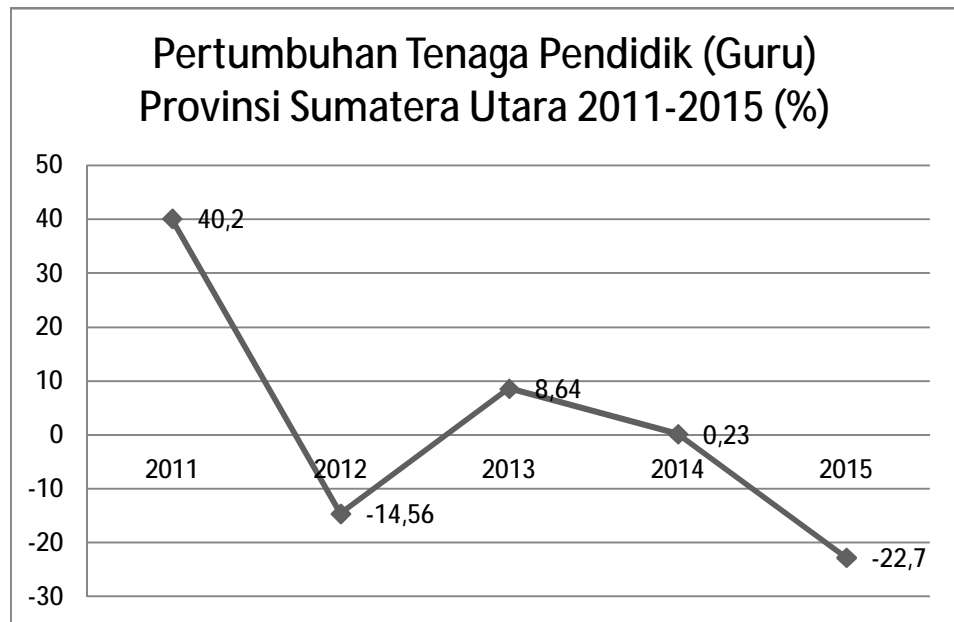
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Dari tabel 4.9 di atas sepanjang tahun 2011-2015 Kota Sibolga dan Pakpak Bharat merupakan daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah tenaga pendidik (guru) terendah setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2011 Kota Sibolga hanya terdapat 1.455 tenaga pendidik (guru) yang sudah termasuk penjumlahan dari Guru SD, SMP, SMA dan SMK. Pada tahun 2012 Kabupaten Pakpak Bharat juga merupakan daerah di Provinsi

Sumatera Utara dengan jumlah tenaga pendidik (guru) terendah yaitu 1.333 tenaga pendidik (guru), terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 1.474 tenaga pendidik (guru), hal ini disebabkan karena pensiun atau dimutasikannya beberapa tenaga pendidik pada tahun itu. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan sehingga 1.254 tenaga pendidik (guru). Tahun 2014 merupakan rahun dengan total tenaga pendidik tertinggi di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu memiliki 1.323 tenaga pendidik (guru), dan turun kembali pada tahun 2015 menjadi 1.098 tenaga pendidik (guru). Rendahnya jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Pakpak Bharat disebabkan karena minimnya jumlah Universitas dan juga sulitnya infrastruktur dan akses untuk menuju ke daerah tersebut. Sehingga mengakibatkan rendahnya minat para tenaga pendidik untuk mengabdikan ke daerah tersebut.

Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2011-2015 memiliki jumlah tenaga pendidik yang terus meningkat dan sebagai daerah dengan total tenaga pendidik tertinggi di seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2011 masih memiliki 31.713 orang sedangkan pada tahun 2012 sudah mencapai 35.816 orang. Hal ini disebabkan pusat pendidikan di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kota Medan, aksesibilitas yang lebih mudah di Kota Medan, serta lebih cepatnya perhatian pemerintah ke Kota Medan daripada ke kabupaten kota lain di Provinsi Sumatera Utara menyebabkan banyak tenaga pendidik yang menginginkan hingga berlomba-lomba untuk

bertugas di Medan, sehingga menyebabkan ketimpangan di daerah-daerah lain sangat tinggi.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Data Diolah

Gambar. 4.8 Pertumbuhan Tenaga Pendidikan (Guru) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Tenaga pendidik di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan total dari Guru SD, SMP, SMA dan SMK dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi sumatera utara. Sepanjang tahun 2011 hingga 2015 pertumbuhan tenaga medis mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012 terjadi penurunan pertumbuhan tenaga pendidik sebesar -14,56% dari 40,20% pada tahun sebelumnya, dan mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,64%. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 lulusan guru meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, serta program-program untuk peningkatan tenaga pendidik (guru) yang mengabdikan di daerah terpencil telah ditingkatkan. Tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar 0,23%. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan tenaga pendidik mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -22,70% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga pendidik (guru) yang pensiun.

B. Hasil Penghitungan Indeks Williamson

1. Sarana Fisik Pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

Untuk melihat adanya ketimpangan di sektor pendidikan, digunakan alat analisis salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson yang menghitung ketimpangan sektor pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang akan diukur dengan indeks williamson adalah tingkat ketimpangan di sektor sarana fisik pendidikan. Sebab apabila ketimpangan antara saran fisik pendidikan dengan jumlah penduduk sangat tinggi, maka dapat dipastikan kondisi pendidikan masyarakat suatu daerah sangat rendah. Karena sarana pendidkan tidak mampu melayani masyarakat secara optimal. Tabel di bawah ini menunjukkan besarnya nilai Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan antara jumlah penduduk di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera utara dengan jumlah sarana fisik pendidikan yang merupakan total dari penjumlahan dari Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK yang telah tersedia di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Tingkat ketimpangan menurut Indeks Williamson terbagi menjadi beberapa kategori, ada ketimpangan yang rendah, sedang, dan tinggi atau moderat.

Tabel 4.10
Indeks Williamson Sarana Fisik Pendidikan dengan Jumlah Penduduk di
Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Williamson					
Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten					
1 Nias	0,0964	0,0979	0,1357	0,0978	0,0978
2 Mandailing Natal	0,1702	0,1694	0,2348	0,1694	0,1694
3 Tapanuli Selatan	0,1380	0,1373	0,1907	0,1376	0,1376
4 Tapanuli Tengah	0,1525	0,1494	0,2113	0,1524	0,1524
5 Tapanuli Utara	0,1415	0,1404	0,1944	0,1404	0,1404
6 Toba Samosir	0,1122	0,1116	0,1547	0,1116	0,1116
7 Labuhanbatu	0,1740	0,1759	0,2435	0,1756	0,1757
8 Asahan	0,2158	0,2138	0,2993	0,2157	0,2157
9 Simalungun	0,2321	0,2294	0,3175	0,2293	0,2296
10 Dairi	0,1397	0,1389	0,1925	0,1390	0,1389
11 Karo	0,1621	0,1614	0,224	0,1615	0,1615
12 Deli Serdang	0,3321	0,3437	0,4737	0,3413	0,3416
13 Langkat	0,2544	0,2535	0,3517	0,2531	0,2531
14 Nias Selatan	0,1441	0,1431	0,1985	0,1428	0,1427
15 Humbang Hasundutan	0,1129	0,1124	0,1557	0,1124	0,1124
16 Pakpak Bharat	0,0563	0,0562	0,0781	0,0563	0,0563
17 Samosir	0,0936	0,0932	0,1291	0,0932	0,0932
18 Serdang Bedagai	0,2031	0,2008	0,2794	0,2016	0,2016
19 Batubara	0,1659	0,1645	0,2295	0,1657	0,1656
20 Padang Lawas Utara	0,1303	0,1303	0,1815	0,1308	0,1308
21 Padang Lawas	0,1322	0,1346	0,1834	0,1323	0,1323
22 Labuhanbatu Selatan	0,1455	0,146	0,2023	0,1459	0,1458
23 Labuhanbatu Utara	0,1548	0,159	0,2145	0,1548	0,1548
24 Nias Utara	0,0969	0,0966	0,134	0,0966	0,0965
25 Nias Barat	0,0778	0,0776	0,1075	0,0776	0,0776
Kota					
71 Sibolga	0,0792	0,0794	0,1096	0,0790	0,0790
72 Tanjungbalai	0,1083	0,1081	0,1503	0,1084	0,1084
73 Pematangsiantar	0,1314	0,1309	0,1815	0,1309	0,1309
74 Tebing Tinggi	0,1049	0,1046	0,1453	0,1048	0,1048
75 Medan	0,3410	0,3514	0,4905	0,3541	0,3543
76 Binjai	0,1357	0,1351	0,1874	0,1352	0,1352
77 Padangsidimpuan	0,1217	0,1216	0,1685	0,1215	0,1216
78 Gunungsitoli	0,0977	0,0973	0,1352	0,0975	0,0975

Menurut Indeks Williamson suatu daerah dikategorikan dengan ketimpangan yang tinggi apabila nilai Indeks Williamson bernilai 0,7 - 1. Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa tidak ada satu pun kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada pada tingkat ketimpangan tinggi tersebut.

Suatu daerah dikategorikan dengan keadaan ketimpangan menengah apabila diperoleh nilai Indeks Williamson berada diantara 0,4 - 0,69. Dari kriteria ini dan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kota Medan pada tahun 2014 merupakan daerah dengan kategori ketimpangan menengah karena memiliki nilai IW sebesar 0,4905. Hal ini disebabkan karena pemerataan antara penduduk di Kota Medan yang semakin tinggi tidak merata dengan pembangunan sarana fisik sektor pendidikan.

Ketimpangan rendah menurut Indeks Williamson apabila suatu daerah memiliki nilai $< 0,39$. Dari kategori tersebut maka sepanjang tahun 2011-2014 seluruh daerah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori ketimpangan rendah, kecuali Medan pada tahun 2013.

2. Tenaga Pendidikan di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara

Tabel di bawah ini menunjukkan besarnya nilai Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan antara jumlah siswa di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah tenaga pendidik (guru) yang merupakan total dari penjumlahan antara jumlah Guru SD, SMP, SMA dan SMK yang tersedia di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Indeks Williamson Tenaga Pendidik dengan Jumlah Siswa di Kabupaten
Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Williamson Tenaga Pendidik					
Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
Kabupaten					
1 Nias	0,0984	0,0981	0,1361	0,0980	0,0979
2 Mandailing Natal	0,1693	0,1696	0,2350	0,1693	0,1687
3 Tapanuli Selatan	0,1384	0,1374	0,1919	0,1382	0,1380
4 Tapanuli Tengah	0,1523	0,1524	0,2119	0,1526	0,1528
5 Tapanuli Utara	0,1423	0,1414	0,1959	0,1412	0,1414
6 Toba Samosir	0,1123	0,1116	0,1553	0,1119	0,1119
7 Labuhanbatu	0,1754	0,1760	0,2432	0,1757	0,1760
8 Asahan	0,2150	0,2172	0,3000	0,2162	0,2163
9 Simalungun	0,2319	0,2325	0,3228	0,2328	0,2329
10 Dairi	0,1396	0,1389	0,1928	0,1390	0,1392
11 Karo	0,1617	0,1609	0,2241	0,1614	0,1611
12 Deli Serdang	0,3365	0,3351	0,4660	0,3365	0,3417
13 Langkat	0,2514	0,2518	0,3529	0,2531	0,2539
14 Nias Selatan	0,1435	00000	0,2006	0,1440	0,1451
15 Humbang Hasundutan	0,1129	0,1124	0,1561	0,1126	0,1124
16 Pakpak Bharat	0,0562	0,0563	0,0781	0,0563	0,0563
17 Samosir	0,0939	0,0936	0,1297	0,0935	0,0935
18 Serdang Bedagai	0,2040	0,2025	0,2810	0,2024	0,2026
19 Batubara	0,1662	0,1649	0,2294	0,1655	0,1654
20 Padang Lawas Utara	0,1308	0,1321	0,1821	0,1312	0,1310
21 Padang Lawas	0,1311	00000	0,1840	0,1326	0,1324
22 Labuhanbatu Selatan	0,1460	0,1461	0,2031	0,1463	0,1461
23 Labuhanbatu Utara	0,1550	00000	0,2153	0,1552	0,1551
24 Nias Utara	0,0970	0,0967	0,1342	0,0966	0,0965
25 Nias Barat	0,0777	0,0775	0,1077	0,0776	0,0775
Kota					
71 Sibolga	0,0792	0,0790	0,1092	0,0788	0,0787
72 Tanjungbalai	0,1080	0,1077	0,1499	0,1082	0,1081
73 Pematangsiantar	0,1301	0,1299	0,1801	0,1307	0,1299
74 Tebing Tinggi	0,1048	0,1043	0,1447	0,1045	0,1044
75 Medan	0,3437	0,3256	0,4689	0,3462	0,3445
76 Binjai	0,1346	0,1342	0,1867	0,1343	0,1344
77 Padangsidimpuan	0,1205	0,1210	0,1673	0,1207	0,1206
78 Gunungsitoli	0,0973	0,0974	0,1349	0,0973	0,0971

Menurut Indeks Williamson suatu daerah dikategorikan dengan ketimpangan yang tinggi apabila nilai Indeks Williamson bernilai 0,7 - 1. Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa tidak ada satu pun kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada pada tingkat ketimpangan tinggi pada jumlah tenaga pendidik tersebut.

Suatu daerah dikategorikan dengan keadaan ketimpangan menengah apabila diperoleh nilai Indeks Williamson berada di antara 0,4 - 0,69. Dari kriteria ini dan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kota Medan pada tahun 2013 merupakan daerah dengan kategori ketimpangan menengah karena memiliki nilai IW sebesar **0,4689**. Hal ini disebabkan karena pemerataan antara penduduk di Kota Medan yang semakin tinggi tidak merata dengan pembangunan sarana fisik sektor pendidikan.

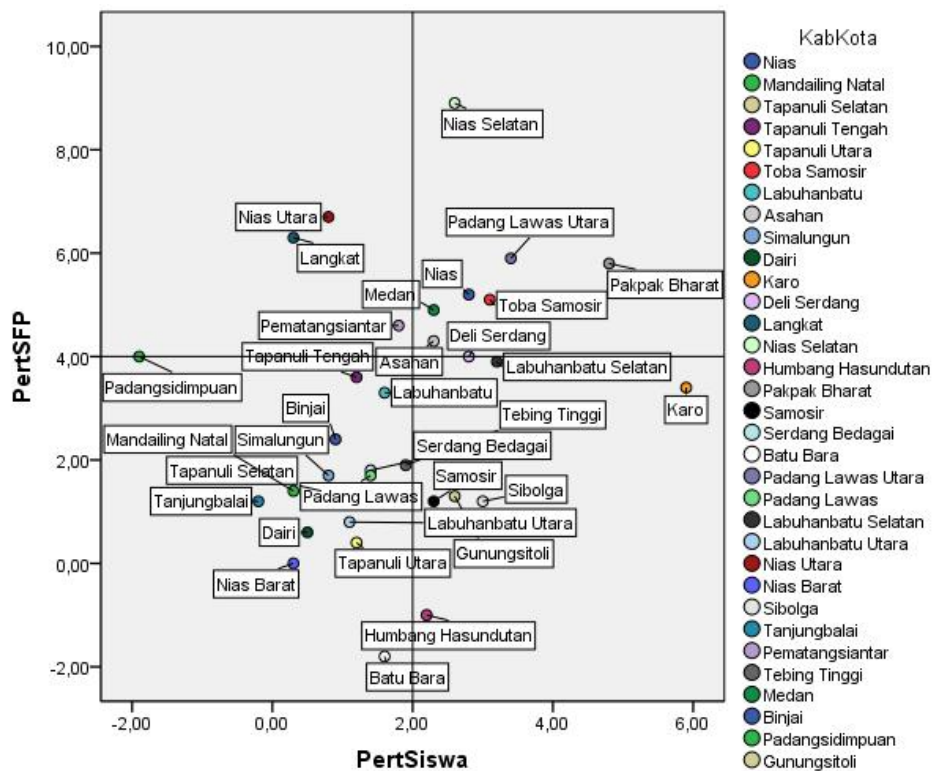
Ketimpangan rendah menurut Indeks Williamson apabila suatu daerah memiliki nilai $<0,39$. Dari kategori tersebut maka sepanjang tahun 2011-2014 seluruh daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori ketimpangan rendah, kecuali Medan pada tahun 2013.

C. Analisis Tipologi Klassen

Klasifikasi daerah pernah dibuat Leo Klassen (1981) dalam makalahnya yang berjudul "*Regional Dynamics*". Tipologi kelas digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tipologi daerah terutama tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah (Kabupaten/Kota).

1. Analisis Tipologi Klassen Jumlah Siswa dan Jumlah Sarana Fisik Pendidikan

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu jumlah siswa dan jumlah sarana fisik pendidikan. Dengan menentukan rata-rata jumlah sarana fisik pendidikan sebagai sumbu Vertikal dan jumlah siswa sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah perkabupaten/Kota dibagi menjadi empat golongan. Yaitu kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth arul high income*), kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten/kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*) dan kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*), daerah maju tapi pertumbuhan ekonominya lambat (*High Income but Low Growth*), daerah berkembang cepat (*High Growth bur Low Income*) dan daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*). Penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung jumlah siswa Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan jumlah sarana fisik pendidikan pada tahun 2011-2015.



Sumber: SPSS Data Diolah

Gambar 4.9
Tipologi Klasen Sarana Fisik Pendidikan dan Jumlah Siswa

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar 4.12 Provinsi Stunatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota dibagi ke dalam 4 kuadran berdasarkan pada laju pertumbuhan penduduk dan sarana fisik kesehatan yang tersedia. Hasil klasifikasi per kabupatenr/kota pada tahun 2011-2015 diperoleh sebagai berikut:

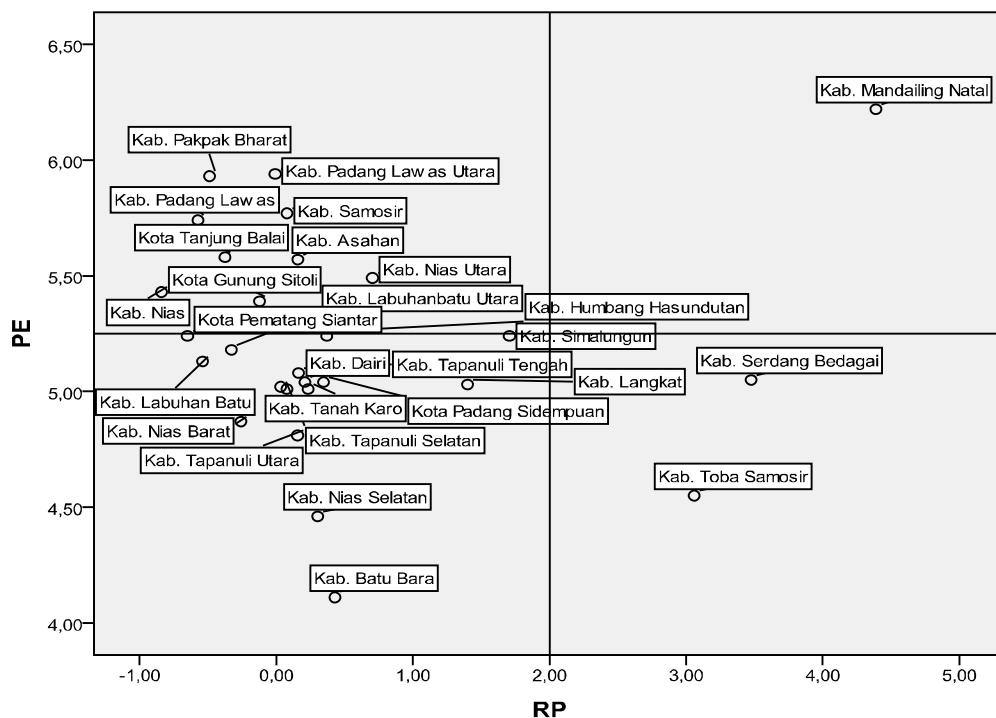
Tabel 4.12
Tipologi daerah Berdasarkan Laju Pertumbuhan Sarana Pendidikan dan Jumlah Siswa

Pembangunan Sarana Pendidikan Pertumbuhan Pendidikan (r)	($y_I > y$)	($y_I < y$)
($r_I > r$)	(kuadran I) Nias Selatan, Padanglawas Utara, Nias, Pakpak Barat, Toba Samosir dan Deli Serdang.	(kuadran II) Kabupaten Nias Utara, Langkat, Medan dan Pematang Siantar.
($r_I < r$)	(kuadran III) Kabupaten Tapanuli Tengah, Asahan, Medan, Binjai, Mandailing Natal, Simalungun, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tanjung Balaim Dairi, Tapanuli Utara, Nias Barat dan Batu Bara.	(kuadran IV) Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tebing Tinggi, Karo, Serdang Bedagai, Sibolga, Samosir, Labuhan Batu Utara dan Gunung Sitoli.

2. Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu jumlah siswa dan jumlah sarana fisik pendidikan. Dengan menentukan rata-rata jumlah tenaga pendidik sebagai sumbu Vertikal dan jumlah siswa sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah perkabupaten/Kota dibagi menjadi empat golongan. Yaitu kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth arul high income*), kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten/kota yang berkembang

cepat (*high growth but low income*) dan kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*), daerah maju tapi pertumbuhan ekonominya lambat (*High Income but Low Growth*), daerah berkembang cepat (*High Growth but Low Income*) dan daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*). Penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung jumlah siswa Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan jumlah sarana fisik pendidikan pada tahun 2011-2015.



Sumber: SPSS Data Diolah

Gambar 4.10
Tipologi Klasen Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar 4.13 Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota dibagi ke dalam 4 kuadran berdasarkan pada laju pertumbuhan siswa dan tenaga pendidik yang tersedia. Hasil klasifikasi per kabupaten/kota pada tahun 2011-2015 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.13
Tipologi daerah Berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan

Pembangunan Tenaga Pendidik Pertumbuhan Pendidikan (r)	($yI > y$)	($yI < y$)
($rI > r$)	(kuadran I) Kabupaten Mandailing Natal.	(kuadran II) Kabupaten Pakpak Bharat, Padang Lawas, Samosir, Tanjung Balai, Asahan, Gunung Sitoli, Nias Utara, dan Nias.
($rI < r$)	(kuadran III) Kabupaten Labuhan Batu, Pematang Siantar, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Langkat, Nias Barat, Tanah Karo, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Nias Selatan dan Batu Bara.	(kuadran IV) Kabupaten Serdang Bedagai dan Toba Samosir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perkembangan siswa yang dilihat dari pertumbuhan jumlah siswa Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 3.065.280 jiwa pada tahun 2015, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera jumlah siswa selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan jumlah siswa tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 509.777 jiwa.
2. Berdasarkan Indeks Williamson yang diperoleh dari mengukur tingkat ketimpangan antara jumlah siswa kabupaten kota di Sumatera Utara dengan jumlah sarana pendidikan, maka diperoleh hasil beberapa kabupaten kota dengan ketimpangan tertinggi pada tahun tertentu, yaitu Kota Medan pada tahun 2013 dengan nilai IW 0.39. Kota Medan 0,49 pada tahun 2013.
3. Berdasarkan Indeks Williamson yang diperoleh dari mengukur tingkat ketimpangan antara jumlah siswa di kabupaten kota di Sumatera Utara dengan tenaga pendidik yang tersedia, maka diperoleh hasil beberapa kabupaten kota dengan ketimpangan tertinggi pada tahun tertentu, yaitu Kota Medan sebagai Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat ketimpangan tertinggi sepanjang tahun 2011-2015, yaitu 0,3437 pada

tahun 2011, 0,3256 pada 2012, 0,4689 pada 2013, 0,3462 pada 2014 dan 0,3445 pada 2015..

4. Menurut Pemetaan dengan Typologi Klassen antara jumlah siswa dengan sarana pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah di Provinsr Sumatera Utara yang masuk ke dalam kuadran I yang berarti memiliki jumlah siswa tertinggi dan sarana pendidikan yang tinggi.
5. Menurut Pemetaan dengan Typologi Klassen antara Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Anggaran Pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal sebagai daerah di Provinsi Sumatera Utara yang masuk ke dalam kuadran I yang berarti memiliki pembangunan ekonomi tertinggi dan realisasi anggaran pendidikan yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneltian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kota serta Provinsi harus lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sarana fisik pada sektor pendidikan, agar tingkat ketimpangan menjadi lebih rendah antar tiap daerah. Sehingga dapat lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebab jumlah siswa yang terus meningkat setiap tahunnya.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kota serta Provinsi harus lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sarana fisik pada sektor

pendidikan, agar tingkat ketimpangan menjadi lebih rendah antar tiap daerah. Sehingga dapat lebih memberikan peiayanan yang maksimal kepada masyarakat sebab jumlah siswa yang terus meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Todaro, Michael P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesebelas*. Jakarta : Erlangga.
- (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 2 Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Basic Econometric (Ekonometrika Dasar) Edisi Keempat*. Mc Graw-Hill / Irvin.
- Winarno, Wing Wahyu, (2015). *Analisa Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Keempat*. Yogyakarta : Upp STIM ykpN.
- Djalal, Nachrowi dan Hardius Usman, (2008). *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- BPS, (2015). *Survey Sosial Ekonomi Nasional*.
- BPS Sumut ([www.BPS Sumut.co.id](http://www.BPS.Sumut.co.id)).
- Wasbullah, (2005). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- [http://wasbullah.blogspot.com/2005/dasar-dasar ilmu pendidikan](http://wasbullah.blogspot.com/2005/dasar-dasar%20ilmu%20pendidikan).
- Republik Indonesia, (2003). “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan*”.
- Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), (1983).
- Prastya, F. Eko, (2015). *Artikel Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- <https://fahendrablog.wordpress.com/2015/06/19/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi/>
- <http://alviescoot.blogspot.co.id/2014/09/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi.html>
- Widi Asih, (2015). *Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan Pendidikan Akuntansi (2015).

Ois, Nur. 2012. *Kesenjangan Sosial Di Dunia Pendidikan*. [Online].
[http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/11/kesenjangan-sosial-di-dunia-
pendidikan/diakses tanggal 6 Desember 2012](http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/11/kesenjangan-sosial-di-dunia-
pendidikan/diakses tanggal 6 Desember 2012)

Herwin Mopangga, (2011). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*

Trias Dewi Yunisti, *Analisi Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten atau
Kota Provinsi Banten*